

**OTORITAS TRADISIONAL
(STUDI NARATIF EKSISTENSI KEPEMIMPINAN *TOMAKAKA* di
KECAMATAN WALENRANG KABUPATEN LUWU)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

**MARHAMAH
10538301214**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI**

OKTOBER 2018

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Marhamah**, NIM 10538301214 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 189/Tahun 1440 H/2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2018.

08 Safar 1440 H

Makassar, -----

18 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd.

Penguji :

1. Andi Adam, S.Pd., M.Pd.

2. Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd.

3. Dr. Hj. Budisetiawati, M.Si.

4. Drs. H. Hambali, S.Pd., M.Hum.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Drs. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Otoritas Tradisional (Studi Naratif Eksistensi Kepemimpinan Tomakaka Di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu)

Nama : Marhamah

NIM : 10538301214

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

08 Safar 1440 H

Makassar

18 Oktober 2018 M

Disahkan oleh:

Pembimbing I

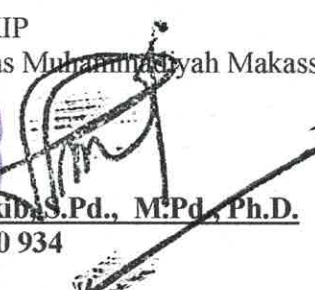
Pembimbing II


Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.


Dr. Muhammad Akhir, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erywin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Drs. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARHAMAH**

Stambuk : 10538 3012 14

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Judul Skripsi : **Otoritas Tradisional (Studi Naratif Eksistensi
Kepemimpinan *Tomakaka* di Kecamatan Walenrang
Kabupaten Luwu)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah asli hasil karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Oktober 2018
Yang Membuat Pernyataan

MARHAMAH
NIM. 10538 3012 14



SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARHAMAH**
NIM : 10538 3012 14
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini, saya akan menyusunnya sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi ini, saya akan melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
4. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1, 2 dan 3, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Oktober 2018
Yang Membuat Perjanjian

MARHAMAH
NIM. 10538 3012 14

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Man Jadda Wa Jada

barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkannya.

Sujud syukur ku persembahkan pada Allah yang maha kuasa,berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas, dan putaran roda kehidupan yang dierikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skirpsiku pada orang-orang tersayang :

Kedua orang tuaku, yang telah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih buat Mama (almh), Papa, dan Bunda. Kakak dan adikku.

Sahabat masa kecilku (Lulu Mallu dan Ina Dirgahayu), yang senantiasa membantu selama penelitianku. Sahabat seperjuanganku semasa kuliah (Siti Miftahul Jannah, Nuhrasa Verdiana, Musliani, Jumiati, Rusni Hadji, Hilma Oktvia, dan Muh. Musbah) yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat- sahabat seperjuanganku yang lain yang tak bisa disebutkan satu-persatu. Terimah kasih buat kalian semua.

ABSTRAK

Marhamah. 2018. *Otoritas Tradisional (Studi Naratif Eksistensi Kepemimpinan Tomakaka di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu)*. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing Jasruddin dan Muhammad Akhir.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi kepemimpinan *Tomakaka* di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu serta untuk mengetahui relasi *Tomakaka* dengan pemerintah di Kecamatan Walenrang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Tomakaka Bulu, Tomakaka Parembonan, Camat Walenrang, Sekertaris Kelurahan Bulu, dan masyarakat Kecamatan Walenrang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya eksistensi kepemimpinan *Tomakaka* di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, masih sangat diperhitungkan dan dianggap masih penting untuk dipertahankan. Relasi *Tomakaka* dengan Pemerintah di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu saat ini masih terjalin sangat baik.

Kata Kunci : Tomakaka, Eksistensi, Relasi

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis persembahkan ke hadirat Allah Swt oleh karena taufik dan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada nabi Muhammad Saw yang diutus oleh Allah Swt sebagai pengemban misi dakwah dalam menyampaikan kebenaran kepada manusia sehingga senantiasa berada di jalan yang haq.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya yang masih sangat sederhana. Namun, penulis persembahkan kehadiran para pembaca yang budiman, semoga setelah menelaah isinya dan berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah memberi bantuan dan partisipasinya dalam usaha penyelesaian skripsi ini terutama ditujukan kepada Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, S.Pd.,M.Pd.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Wakil Dekan I, II, III, dan IV, para Bapak/Ibu Dosen serta segenap pegawai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya kepada Prof. Dr. Jasruddin, M.Si dan Dr. Muhammad Akhir, M.Pd., selaku pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada orang tua penulis, Marlina (almh), Eko Suanto S.Pd dan Hiderana S.Pd yang telah mengasuh, mendidik dan membimbing penulis mulai dari kecil hingga sampai sekarang ini dengan penuh kasih sayang. Bapak Kepala Kecamatan Walenrang, yang telah

menerima penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan keterangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi ini.

Semoga skripsi ini memberikan manfaat khususnya kepada penulis dan umumnya kepada para pembaca, aamiin. Penulis senantiasa menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga mendapat limpahan rahmat dan amal yang berlipat ganda di sisi Allah Swt.

Makassar, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	10
1. Pengertian Eksistensi.....	10
2. Pengertian Relasi	11
3. Kepemimpinan	13
4. Kepemimpinan Menurut Ajaran Tradisional.....	15
5. Wewenang Tradisional.....	17
6. Tomakaka	18
7. Landasan Teori	21
a. Teori Struktural Fungsional.....	21
b. Teori Otoritas	22

8. Penelitian yang Relevan	24
B. Kerangka Konsep	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokus Penelitian	30
C. Informan Penelitian	31
D. Fokus Penelitian	32
E. Instrument Penelitian.....	32
F. Jenis dan Sumber Data.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
H. Teknik Analisis Data	35
I. Teknik Pengapsahan Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran dan Histori Lokasi Penelitian	37
1. Deskripsi Umum Kabupaten Luwu sebagai Daerah Penelitian	37
a. Sejarah Singkat Kabupaten Luwu	37
b. Geografi dan Iklim	39
c. Topografi, Geologi dan Hidrologi	39
d. Kondisi Demografi	41
2. Deskripsi Khusus Kecamatan Walenrang sebagai Latar Penelitian	43
a. Demografi Kecamatan Walenrang.....	43
b. Kondisi Sosial Kecamatan Walenrang	43
c. Struktur Organisasi Kecamatan Walenrang.....	45
3. Informan Penelitian	47
B. Hasil Penelitian	48
1. Eksistensi Kepemimpinan <i>Tomakaka</i> di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu	49
2. Relasi <i>Tomakaka</i> dengan Pemerintah di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu	53
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 62

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA..... 64

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.Kerangka Konsep	29
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kecamatan Walenrang	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Observasi

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 3. Dokumentasi

Lampiran 4. Surat Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Oleh karena itu, suatu kekuasaan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang baik dan buruk. Penilaian baik atau buruk kekuasaan harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat. Karena kekuasaan sendiri mempunyai sifat yang netral, maka menilai baik atau buruknya harus dilihat pada penggunaannya bagi keperluan masyarakat. Kekuasaan senantiasa ada dalam setiap masyarakat, baik yang masih bersahaja, maupun yang sudah besar atau rumit susunannya, kekuasaan terdapat disemua bidang kehidupan yang dijalankan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya.

Kekuasaan mempunyai aneka macam bentuk dan bermacam-macam sumber hak milik kebendaan dan kedudukan merupakan sumber kekuasaan. Birokrasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, di samping kemampuan khusus dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan yang tertentu ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum yang tertentu. Jadi kekuasaan terdapat dimana-mana, baik dalam hubungan sosial maupun di dalam organisasi-organisasi sosial. Kekuasaan sejatinya adalah imanen, dan selalu ada dalam urusan manusia. Hal ini disebabkan

manusia adalah hewan politik, sehingga dalam pengertian paling dasar kekuasaan selalu terkait dengan politik untuk mendapatkan sesuatu melalui cara-cara tertentu. Menurut Mc Glynn dan Arthur (2000:3), dalam membangun kekuasaan itu, elit-elit lokal mengembangkan organisasi politik, yaitu sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk memelihara tata tertib yang memungkinkan penguasa memperoleh dukungan secara luas. Haviland (1988:159) mengemukakan, organisasi seperti itu mungkin terdesentralisasi dan bersifat informal, seperti pada masyarakat kecil, kaum maupun kelompok-kelompok etnik yang dipimpin oleh kepala suku atau raja. Dengan demikian, organisasi politik merupakan suatu hubungan sosial mengenai koordinasi dan pengaturan perilaku, sejauh perilaku itu ada hubungannya dengan pemeliharaan tata tertib umum.

Pentingnya organisasi politik, karena dalam suatu masyarakat yang terisolasi dan stabil selalu muncul permasalahan tertentu, dan permasalahan tersebut hanya dapat dipecahkan melalui aturan-aturan, maupun tugas-tugas yang tegas (Keesing, 1992:38). Artinya, dalam setiap kekuasaan dan kepemimpinan selalu terdapat sebuah mekanisme kontrol sosial yang berfungsi menjaga tata tertib masyarakat, sekaligus menjadi sarana untuk melegitimasi kekuasaan para penguasa. Dalam sebuah masyarakat yang relatif kecil, di mana kesatuan-kesatuan sosialnya juga kecil, yang hanya terdiri dari sepuluh hingga lima belas orang saja, menurut Koentjaraningrat bahwa mereka tidak memerlukan seorang pimpinan untuk menguasai dan mengatur mereka secara formal. Kekuasaan dan kepemimpinan bagi mereka hanya dibutuhkan pada moment-moment tertentu saja, seperti pada saat ada pekerjaan atau aktivitas bersama, yang memerlukan

seorang kordinator untuk aktivitas tersebut, di luar adanya kegiatan itu maka mereka tidak memerlukan adanya kekuasaan yang didominasi oleh beberapa orang yang akan mengatur dan mengontrol mereka. Dan ini terjadi kebanyakan di dalam masyarakat tradisional yang tinggal di pedalaman dalam suatu daerah.

Menjadi seorang tokoh yang dapat ditunjuk sebagai seorang pemimpin pada saat ada pekerjaan atau aktivitas bersama dalam masyarakat yang kecil ini, hanya dibutuhkan kemampuan atau ketrampilan untuk menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas itu. Ini artinya dalam menyelesaikan masalah-masalah atau mengerjakan aktivitas tertentu lainnya, dapat muncul tokoh yang berbeda untuk menjadi pemimpin dalam mengerjakan aktivitas tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang masih relatif kecil dapat memunculkan tokoh-tokoh yang berbeda-beda dalam pekerjaan yang berbeda-beda pula. Hal ini tidak terlepas karena tidak adanya pemimpin formal yang berkuasa dalam seluruh lini kehidupan. Contoh kecil adalah dalam musim berburu misalnya, maka akan muncul seorang tokoh yang paling trampil dan pandai dalam melakukan pekerjaan itu dalam kesatuan-kesatuan sosial yang kecil ini, dan mereka menentuk untuk menjadikannya sebagai seorang pemimpin pada pekerjaan bersama tersebut. Akan tetapi dalam aktivitas lain seperti dalam upacara-upacara sesembahan, akan dibutuhkan seorang tokoh yang ahli dalam bidang ini untuk mengatur dan memimpin acara tersebut.

Adapun dalam masyarakat yang kesatuan-kesatuan sosialnya sudah lebih besar dan kompleks, maka mereka pun juga membutuhkan adanya seorang pemimpin formal yang tidak hanya ada atau muncul pada saat-saat tertentu saja

ketika ada sebuah aktivitas bersama, tetapi mereka membutuhkan seorang pemimpin yang hadir dan dapat memberikan arahan dan pengaturan dalam seluruh lini kehidupan. Ini biasanya menurut Koentjaraningrat terjadi pada komunitas-komunitas yang hidup di daerah pegunungan di Irian Jaya, Papua Nugini dan Malanesia pada umumnya. Kesatuan-kesatuan yang sudah relatif besar ini dalam pandangan Koentjaraningrat disebut sebagai “masyarakat sedang”. Ini menunjukkan bahwa dalam “masyarakat sedang” diperlukan satu bentuk kepemimpinan yang mantap dan tetap, dan untuk memantapkan kepemimpinan itu diperlukan kekuasaan di samping kewibawaan.

Pada “masyarakat sedang” ini untuk menjadi pemimpin dan mempertahankan kekuasaannya tidak hanya diperlukan kewibawaan dan kepandaian atau ketrampilan dalam bidang tertentu saja sebagaimana dalam masyarakat komunitas sosialnya yang masih kecil, akan tetapi kekuasaan bagi mereka harus dipertahankan melalui berbagai kemampuan dan sifat yang di miliki. Adapun kemampuan-kemampuan itu biasanya adalah kepandaian berkebun, kefasihan berpidato, keterampilan dan keberanian dalam berperang. Suatu kemampuan lain yang sering kali disebut adalah kekayaan harta, yang memang memungkinkan para tokoh pemimpin itu untuk banyak memberi kepada orang lain, dengan memikat mereka dengan berbagai pemberian harta benda.

Koentjaraningrat melihat bahwa sistem kekuasaan dalam negara kuno (tradisional) yang ada di dunia baik di Indonesia, Polonesia, Afrika, dan di Asia lainnya memiliki kesamaan konseptual dalam melihat kekuasaan dan kepemimpinan. Dalam negara kuno, di mana kesatuan-kesatuan sosial berupa

negara, dengan penduduk yang tidak lagi hanya terdiri dari beberapa ratus orang sebagaimana dalam “masyarakat sedang” melainkan beribu-ribu bahkan berpuluh-puluh ribu orang, dan dapat memberikan suatu rasa identitas kepada mereka. Dalam negara kuno yang seperti ini wewenang seorang pemimpin tidak lagi hanya dibutuhkan kewibawaan (*legitimacy*) saja, yang bersumber pada keahliannya, keterampilannya, dan kepandaiannya dalam lapangan-lapangan tertentu. Akan tetapi, kebanyakan elit penguasa negara kuno untuk mempertahankan dan menjaga loyalitas rakyatnya, menjadi sangat penting untuk menggunakan konsep-konsep religi dan cara-cara keagamaan untuk memaksakan keseragaman orientasi pada masyarakat yang ada dalam negara tersebut, yang awalnya memiliki aneka warna kebutuhan, kehendak dan keyakinan.

Hal di atas inilah, yang menjadikan dalam negara-negara kuno maupun kerajaan, termasuk di Indonesia, seorang raja untuk mempertahankan kekuasaannya dan menjaga loyalitas rakyatnya, mereka seringkali memberikan doktrin kepada rakyatnya bahwa seorang individu yang menjadi raja memiliki garis keturunan pada dewa-dewa, sehingga wewenang yang berdasarkan keturunan tadi tidak hanya wewenang yang kuat, tapi juga wewenang yang keramat. Selain itu, seorang raja dalam negara-negara kuno seringkali memperkuat sifat-sifat keramatnya dengan jalan mengembangkan keyakinan bahwa ia memiliki cahaya keramat atau wahyu dari dewa atau Tuhan, yang pada akhirnya masih lagi ditambah dengan keyakinan bahwa sang raja itu memiliki kekuatan yang sakti. Hal-hal demikian dapat kita lihat dalam cerita-cerita raja-raja Jawa.

Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia terdapat dua bentuk pimpinan pemerintahan yaitu pimpinan formal (modern) dan pimpinan nonformal (tradisional). Pimpinan formal (modern) adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi. Sedangkan pimpinan nonformal (tradisional) adalah kepemimpinan yang bersumber dari kewenangan tradisional yaitu yang berasal dari kepercayaan masyarakat yang telah mapan terhadap tradisi dan legitimasi orang yang memiliki kewenangan berdasarkan tradisi tersebut.

Salah satu bentuk pemimpin tradisional yaitu *Tomakaka* yang terdapat di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. *Tomakaka* adalah penguasa yang diakui oleh para warga atau masyarakat yang ada di Kecamatan Walenrang, dan karenanya mendapat legitimasi untuk menjadi pemimpin di masyarakat adat.

Sesuai dengan uraian diatas maka melirik suatu daerah di Sulawesi selatan yaitu tepatnya di daerah Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang terdapat suatu bentuk sistem kepemimpinan tradisional yang dipimpin oleh *Tomakaka*. Pemerintahan *Tomakaka* dapat disebut sebagai pemerintahan monarki. Menurut Balandier (1986:178), sistem politik *monarchy* menyebabkan penguasa senantiasa diharapkan memberi perlindungan yang pada gilirannya menciptakan hubungan patron-klien. Sistem kekuasaan yang patrimonial ini mendasari budaya politik, yaitu budaya kerajaan. Namun demikian budaya kerajaan pada masyarakat Walenrang, tidak selalu berkonotasi negatif. Hal ini disebabkan pemerintah

Tomakaka, juga didasari oleh praktik demokrasi lokal yang mendapat legitimasi masyarakat. Oleh karena itu, dengan latar belakang diatas peneliti mengangkat tema ***Otoritas Tradisional (Studi Naratif Eksistensi Kepemimpinan Tomakaka di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu)***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran pada pemaparan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi kepemimpinan *Tomakaka* di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu ?
2. Bagaimanakah relasi *Tomakaka* dengan pemerintah di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan permasalahan di atas, Dalam penelitian ini mempunyai tujuan baik bersifat ilmiah, sosial maupun akademis, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui eksistensi kepemimpinan *Tomakaka* di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui mengetahui relasi *Tomakaka* dengan pemerintah di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia sosiologi politik dan antropologi.
- b. Menjadi salah satu bahan acuan penelitian di bidang sosiologi politik dan antropologi.
- c. Menjadi salah satu kajian untuk penulisan ilmiah berkenaan dengan lembaga terkait.

2. Manfaat praktis

- a. Melalui penelitian ini maka peneliti dapat mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti, sehingga nantinya dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai akhir dari penelitian.
- b. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran, penalaran, pemahaman landasan pengetahuan serta pola kritis bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian di bidang ini.
- c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai prasyarat mendapatkan gelar strata satu (S1) Program Studi Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

E. Definisi Operasional

Tomakaka adalah penguasa yang diakui oleh para warga atau masyarakat yang ada di Kecamatan walenrang, dan karenanya mendapat legitimasi untuk menjadi pemimpin yang sederajat dengan kepala desa.

Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga di masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.

Tradisional adalah aksi dan tingkah laku yang keluar alamiah karena kebutuhan dari nenek moyang yang terdahulu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Eksistensi

Eksistensi bisa juga dikenal dengan satu kata yaitu keberadaan. Konsep eksistensi menurut Dagun (dalam Kartika, 2012: 15) dalam kehidupan sosial manusia yang terpenting adalah keadaan dirinya sendiri atau eksistensi dirinya sendiri. Eksistensi dapat diartikan sesuatu yang menganggap keberadaan manusia tidaklah statis, artinya manusia senantiasa bergerak dari kemungkinan ke kenyataan.

Proses ini berubah bila kini menjadi sesuatu yang mungkin maka besok akan berubah menjadi kenyataan karena manusia itu mempunyai kebebasan untuk bergerak. Bereksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan bagi hidupnya. Konsekuensinya jika kita tidak bisa mengambil keputusan dan tidak berani berbuat maka kita tidak bereksistensi dalam arti yang sebenarnya. Artinya, eksistensi menjelaskan tentang penilaian ada atau tidak adanya pengaruh terhadap keberadaan seseorang tersebut. Apabila orang lain menganggap kita mempunyai sebuah eksistensi, maka keberadaan kita sudah dianggap dan dapat diperhitungkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Eksistensi biasanya dijadikan sebagai acuan pembuktian diri bahwa kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang dapat berguna dan mendapat nilai yang baik di mata orang lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi adalah kemampuan seseorang untuk tetap dikenal dan dihargai melalui wujud dan hasil kerjanya.

2. Pengertian Relasi

Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau *relation*. Relasi juga disebut sebagai hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Menurut Michener & Delamater (dalam Hidayati, 2014:22) relasi sosial juga disebut hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Hubungan dalam relasi sosial merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Beberapa tahapan terjadinya relasi sosial yaitu (a) *Zero contact* yaitu kondisi dimana tidak terjadi hubungan antara dua orang; (b) *awareness* yaitu seseorang sudah mulai menyadari kehadiran orang lain; (c) *surface contact* yaitu orang pertama menyadari adanya aktivitas yang sama oleh seseorang di sekitarnya; dan (d) *mutuality* yaitu sudah mulai terjalin relasi sosial antara 2 orang yang tadinya saling asing.

Menurut Spradley dan McCurdy (dalam Astuti, 2012:1), menyatakan bahwa relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relative lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini disebut sebagai pola relasi sosial yang terdiri dari dua

macam yaitu (a) relasi sosial asosiatif yaitu proses yang terbentuk kerja sama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi yang terjalin cenderung menyatu; (b) relasi sosial disosiatif yaitu proses yang terbentuk oposisi misalnya persaingan.

Suatu relasi atau hubungan akan ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat macam tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya. Dikatakan sistematis karena terjadinya secara teratur dan berulang kali dengan pola yang sama. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi, manusia berusaha mencukupi semua kebutuhannya untuk kelangsungan hidupnya, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Itulah sebabnya manusia perlu berelasi atau berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial dalam rangka menjalani kehidupannya selalu melakukan relasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok atau antar individu dengan kelompok.

Hubungan sosial atau relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain, saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong, relasi sosial merupakan proses mempengaruhi di antara dua orang.

Bentuk relasi yang terjadi yang terjadi antara *Tomakaka* dengan aparat desa setempat bukan terjadi tanpa sengaja melainkan karena adanya

kesadaran bahwa keduanya saling membutuhkan dalam kegiatannya menjalankan pemeritahan di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan (*Leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau *leader*) untuk memengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Menurut Koentjaraningrat, (1967:181) Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala sesuatu badan yang seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.

Kepemimpinan Menurut George R. Terry (1972:458) Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan Menurut Ralph M. Stogdill dalam Sutarto (1998:13): Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai tujuan. Kepemimpinan Menurut Sutarto (1998:25): Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan ada yang bersifat resmi (*formal leadership*), yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam jabatan. Ada pula kepemimpinan karena pengakuan masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan. Suatu perbedaan yang mencolok antara kepemimpinan yang resmi dan kepemimpinan tidak resmi (*informal leadership*) adalah kepemimpinan yang resmi di dalam pelaksanaannya selalu harus berada di atas landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi. Dengan demikian, daya cakupnya agak terbatas. Kepemimpinan tidak resmi, mempunyai ruang lingkup tanpa batas-batas resmi, karena kepemimpinannya didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Ukuran benar tidaknya kepemimpinan tidak resmi terletak pada tujuan dan hasil pelaksanaan kepemimpinan tersebut, menguntungkan atau merugikan masyarakat. Walaupun seorang pemimpin (yakni yang melaksanakan kepemimpinan) yang resmi tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan resmi yang menjadi landasannya, pemimpin tersebut dapat melakukan kebijakan yang dapat memajukan kemampuan mereka sebagai pemimpin. Misalnya, kebijaksanaan tersebut dapat diwujudkan di dalam memilih waktu untuk melaksanakan peraturan-peraturan atau memilih orang-orang yang langsung berhubungan dengan masyarakat untuk melaksanakan peraturan dan seterusnya. Menurut Selo Soemardjan (1967) Kepemimpinan yang tidak resmi dapat digunakan pula di dalam suatu jabatan resmi dan tentu saja lebih leluasa di dalam masyarakat yang belum dipagut peraturan-peraturan resmi dalam

bidang yang terakhir tadi, seorang pemimpin dapat menggerakkan kekuatan-kekuatan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kesimpulannya kepemimpinan adalah suatu kedudukan yg memiliki tugas dan fungsi untu mengarahkan masyarakat yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan di tempat yang dipimpin, bentuk pemimpin ada dua yaitu kepemimpinan formal dan kepemimpinan tidak formal.

4. Kepemimpinan Menurut Ajaran Tradisional

Pimpinan tradisional adalah pemimpin yang sangat ketat berpegang pada adat kebiasaan yang di turun temurunkan. Kepemimpinan tradisional pada umumnya bertumpu pada tata hukum yang mengatur hidup satu masyarakat. Karena berdasarkan tata hukum, maka kepemimpinan tradisional sebenarnya bersifat legal artinya bersumber pada hukum (Lex=hukum, lagalis adalah kata sifat yang mengungkapkan kaitan sesuatu dengan hukum. Dalam sistem kepemimpinan tradisional yang di tekankan adalah unsur pertalian darah, sehingga penempatan individu dalam posisi dan jabatan yang ada tidak tergantung pada tepat tidaknya orang tersebut berdasarkan kemampuannya untuk menduduki posisi itu , melainkan pada dekat tidaknya pertalian keluarga dengan pemimpin tradisional itu.

Pimpinan tradisional ini diakui kepemimpinannya bukan karena kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, melainkan hanya karena pengaruhnya dengan keluarga sudah melembaga dan menjiwai masyarakat.

Hal ini terutama karena pimpinan itu mempunyai reputasi yang tinggi, sehingga keturunannya dipercaya terus menerus memegang tampuk pimpinan.

Di Jawa misalnya menggambarkan seorang pemimpin melalui pepatah sebagai berikut.

Ing ngarsa sung tulada

Ing madya mangun karsa

Tut wuri handayani

Pepatah tersebut sering digunakan oleh almarhum Ki Hajar dewantara, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah sebagai berikut.

Di muka mmemberi tauladan

Di tengah-tengah membangun semangat

Dari belakang memberi pengaruh

Artinya seorang pemimpin yang di muka harus memiliki idealisme kuat, kedudukan, serta harus dapat menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara-cara sejelas mungkin karena dia harus mampu menentukan suatu tujuan bagi masyarakat yang dipimpinnya, serta merintis ke arah tujuan tersebut dengan menghilangkan segala hambatan, antara lain dengan menghapuskan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah usang.

Seorang pemimpin di tengah mengikuti kehendak yang di bentuk masyarakat. Ia selalu dapat mengamati jalannya masyarakat, serta dapat merasakan suka dukanya. Dan dia di harapkan dapat merumuskan perasaan-

perasaan serta keinginan-keinginan masyarakat dan juga menimbulkan keinginan masyarakat untuk memperbaiki keadaan yang kurang menguntungkan.

Seorang pemimpin yang di belakang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mengikuti perkembangan masyarakat. Dia berkewajiban untuk menjaga agar perkembangan masyarakat tidak menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai yang pada suatu masa di hargai oleh masyarakat. Ssendi kepemimpinan adalah keutuhan dan harmoni. Kepemimpinan di belakang masih jelas tergambar dari istilah-istilah seperti “pamong raja”, “pamong desa” dan seterusnya yang menggambarkan bahwa fungsi pemimpin adalah untuk membimbing masyarakat.

Perlu dicatat bahwa kepemimpinan dalam masyarakat-masyarakat tradisional pada umumnya dilaksanakan secara kolegal (bersama-sama), contohnya seorang penyumbang marga sebagai kepala adat di Daerah Lampung tidak akan bertindak sendiri sebelum di rundingkan dalam suatu rapat.

5. Wewenang Tradisional

Wewenang tradisional dapat dipunyai oleh seseorang maupun sekelompok orang. Dengan kata lain, wewenang tersebut dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota kelompok, yang sudah lama sekali mempunyai kekuasaan di dalam suatu masyarakat. Wewenang tadi dipunyai oleh seseorang atau sekelompok orang bukan karena mereka mempunyai kemampuan-

kemampuan khusus seperti pada wewenang kharismatis, tetapi karena kelompok tadi mempunyai kekuasaan dan wewenang yang melembaga dan bukan menjiwai masyarakat. Demikian lamanya golongan tersebut memegang tampuk kekuasaan hingga membuat masyarakat percaya dan mengakui kekuasaannya. Menurut Max Weber (2013:245) ciri-ciri utama wewenang tradisional yaitu, (1) adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnya dalam masyarakat, (2) adanya wewenang yang lebih tinggi ketimbang kedudukan seseorang yang hadir secara pribadi, (3) Selama tak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas.

6. Tomakaka

Jabatan sebagai *Tomakaka* adalah jabatan tertinggi di Desa-desa yang ada Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, pada masa pemerintahan kerajaan sehingga kepadanya masyarakat mengharap atau memperoleh perlindungan, rasa aman dan keadilan dalam menjalani hidup keseharian. Karenanya, ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan dalam pengangkatan *Tomakaka*, yaitu: (1) *Tomakaka* harus berasal dari turunan *Tomakaka* atau *kajajian*, (2) *Tomakaka* harus mempunyai kedewasaan berfikir atau *kamatuaan*, (3) Harus memiliki kekayaan atau *kasugiran*, (4) dan memiliki kebijakan dan kepintaran atau *kakainawaan*, (5) memiliki keberanian atau *kabaranian* (6) serta memiliki rumpun keluarga yang besar (*ma'rapun*). Dalam hal ini seorang *Tomakaka* dianggap sebagai “*Tau*

memanna massipa tau meman” yang artinya, *Tomakaka* sebagai keturunan orang baik-baik dengan sifat-sifatnya yang juga baik .

Demokratisasi dalam pengangkatan *Tomakaka*, membangun kesadaran masyarakat, bahwa pemimpin mereka memiliki kelebihan dan keistimewaan, sehingga perintah *Tomakaka* harus dipatuhi. Karena itu pula, dalam menduduki jabatan sebagai *Tomakaka* harus dilegitimasi melalui sebuah upacara sakral. Dalam upacara tersebut, *Tomakaka* akan mengenakan ikat kepala (*Passapu*) sebagai suatu simbol kebesaran. *Tomakaka* sebagai pemimpin kaum, perannya demikian penting dalam komunitas. Kepemimpinan tradisional ini biasa juga disebut kepala kaum atau kepala suku (*Tokasukuan*) yang berkewajiban untuk menegakkan keadilan sosial dan memberi rasa aman serta menjamin agar situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan tetap harmonis.

Aparat *Tomakaka* yang paling utama adalah *Tomatowa*. *Tomatowa* yang kedudukannya di bawah *Tomakaka*, berperan membantu jalannya pemerintahan tradisional, seperti mengatur kehidupan masyarakat, menjaga terlaksananya adat-istiadat, termasuk berperan dalam menyelesaikan pertentangan antar warga dalam komunitas. *Tomatowa* adalah orang yang dituakan dan karena pengetahuan dan pengalamannya ia amat dihormati dan disegani oleh warga masyarakat. Namun demikian, pandangan dan saran-saran berkenaan dengan fungsinya dalam masyarakat, senantiasa disampaikan terlebih dahulu kepada *Tomakaka* untuk dipertimbangkan, sebelum diputuskan. Hal ini penting, karena setiap keputusan secara otomatis memiliki

kekuatan hukum dan karena itu harus dilaksanakan. Sanksi dari sebuah pelanggaran, harus berlaku umum kepada semua warga, tanpa mengenal siapapun, termasuk kepada keluarga dan kerabat *Tomakaka* sendiri. Karena itu pula, sanksi tersebut harus bersifat konsisten manakala peristiwa serupa terjadi. Dengan demikian, hukuman yang diberikan akan senantiasa memiliki rasa keadilan.

Pembantu *Tomakaka* lainnya dalam menjalankan pemerintahan tradisional adalah *Bungalalan*. *Bungalalan* dikenal sebagai orang yang memiliki sistem pengetahuan lokal tentang pertanian.

Tometari adalah pembantu *Tomakaka* yang berperan untuk menjaga agar kampung tetap dingin sehingga terhindar dari bahaya dari penyakit tertentu atau hal-hal yang memungkinkan terjadinya bencana bagi masyarakat. Sementara *Tomainawa* yang juga disebut *sandro* berfungsi untuk memberikan pengobatan kepada para warga yang menderita penyakit tertentu. Baik karena penyakit yang disebabkan oleh masalah biasa, maupun penyakit yang terjadi karena magis.

Pa'takin bertugas khusus menjaga keamanan *Tomakaka* maupun warga kampung lainnya. Karena itu, kemanapun *Tomakaka* pergi *Pa'takin* harus bersiap mengawalinya.

Seorang pembantu *Tomakaka* yang tidak kurang penting adalah *Ana Tomakaka* yang diberi tugas untuk membantu *Tomakaka* dalam menjalankan

pemerintahan sehari-hari. Termasuk membantu *Tomakaka* untuk menyampaikan perintah-perintahnya kepada para warga (Hijjang, 1998:54).

Dapat disimpulkan bahwa *Tomakaka* sebagai pemimpin tradisional dipilih dan didukung oleh masyarakat berdasarkan persyaratan-persyaratan baku yang hanya orang terbaiklah yang memiliki persyaratan tersebut. Dan juga pembantu *Tomakaka* adalah orang yang mempunyai kredibilitas dan integritas, hal inilah yang menyebabkan kepemimpinan *Tomakaka* sangat didukung dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Hal ini pula menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dijalankan dalam menciptakan kemakmuran dan harmoni sosial senantiasa dipatuhi.

7. Landasan Teori

a. Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional berkaitan erat dengan sebuah struktur yang tercipta dalam masyarakat. Struktural – fungsional, yang berarti struktur dan fungsi. Artinya, manusia memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam tatanan struktur masyarakat.

Menurut Talcott Parson, struktural fungsional merupakan bagian keseimbangan dalam institusi sosial, yang diakuinya akan eksis atau dikenal masyarakat apabila berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tanpa memberikan perbedaan sedikit pun.

Teori struktural fungsionalisme, yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons, merupakan teori dalam paradigma fakta sosial dan paling besar

pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang, sehingga dapat disinonimkan dengan sosiologi (Ritzer, 2005:117). Teori ini memfokuskan kajian pada struktur makro (sosiologi makro) yakni pada sistem sosial, yang melalui teori ini Parsons menunjukkan pergeseran dari teori tindakan ke fungsionalisme struktural. Kekuatan teoretis Parsons terletak pada kemampuannya melukiskan hubungan antara struktur sosial berskala besar dan pranata sosial (Ritzer 2005:82). Bangunan teori fungsionalisme struktural Parsons banyak terpengaruh oleh pemikiran Durkheim, Weber, Freud dan Pareto, dan yang disebut terakhir inilah yang paling besar pengaruhnya bagi pengembangan teori fungsionalisme struktural, terutama gagasan Pareto tentang masyarakat yang dilihatnya dalam hubungan sistem (Ritzer, 2011:280). Konsepsi Pareto yang sistematis tentang masyarakat, yang dipandanginya sebagai sebuah sistem yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung, sehingga perubahan satu bagian dipandang menyebabkan perubahan lain dari sistem, dan dilebur dengan pandangan Comte, Durkheim dan Spencer yang menganalogikan masyarakat dengan organisme, memainkan peran sentral dalam pengembangan teori fungsionalisme struktural Parsons (Ritzer, 2005:54-55).

b. Teori Otoritas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) otoritas adalah kemungkinan yang di dalamnya terdapat suatu perintah untuk dipatuhi oleh seseorang atau kelompok tertentu. Karenanya, otoritas merupakan bagian

dari suatu relasi kekuasaan sekaligus mengandung unsur perintah dan unsur kontrol.

Sosiolog yang mengembangkan teori kepemimpinan atau otoritas adalah Max Weber (1864 – 1920). Ia dilahirkan di Jerman dari sebuah keluarga kelas menengah. Ia pernah menempuh pendidikan di Universitas Heidelberg. Karir akademik Weber semakin meningkat ketika ia diangkat sebagai Professor Ekonomi di Universitas Freiburg tahun 1894. Karya monumentalnya yang dijadikan sebagai referensi kajian ilmu pengetahuan sosial modern ialah “Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme”.

Max Weber (dalam Upe 2010 : 206) mengembangkan tiga-tipe otoritas dalam masyarakat yakni, otoritas legal (*Legal-Rational Authority*), otoritas tradisional (*Traditional Authority*), otoritas kharismatis (*Charismatic Authority*).

Pertama, tipe otoritas legal (*Legal-Rational Authority*) merupakan pemberian wewenang atau otoritas yang bersumber dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Model otoritas ini cenderung mengutamakan birokrasi (politik dan ekonomi). Model kepemimpinan semacam ini biasanya diterapkan di negara-negara modern atau di kota-kota, badan hukum baik milik pribadi atau serikat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam struktur birokrasi tersebut dipimpin oleh seseorang yang memiliki kharismatik sehingga hasil atau capaian cukup berbeda dan fleksibel.

Kedua, tipe otoritas tradisional merupakan otoritas yang memiliki keabsahan berdasarkan kesucian/kekudusan suatu tradisi tertentu yang hidup di tengah masyarakat. Sehingga ketika seseorang taat dan patuh terhadap suatu peraturan atau pada suatu struktur otoritas disebabkan karena kepercayaan mereka terhadap sesuatu yang bersifat kontinyu.

Hubungan yang terjalin antara tokoh yang memiliki otoritas dan bawahan sejatinya merupakan hubungan pribadi yang cenderung mengarah sebagai bentuk perpanjangan hubungan kekeluargaan. Adanya kesadaran yang penuh antara pemimpin untuk melaksanakan kewajibannya dan bawahan sebagai bentuk kesetiaan dan kecintaan kepada pemimpin.

Ketiga, tipe kharismatik digambarkan secara sosiologis oleh Weber yaitu sebagai suatu pengakuan oleh para pengikut seorang pemimpin (*leader*) akan keistimewaannya. Weber kemudian memahami bahwa yang dimaksud dengan otoritas kharismatik sebagai tipe kepemimpinan yang keabsahannya diakui oleh kualitas, keistimewaan, keunggulan. Selain itu, otoritas kharismatik ditemukan pada pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang dapat menginspirasi orang.

9. Penelitian yang Relevan

a. Muh. Yamin Sani. 2013. *Tomakaka : Demokrasi Lokal Dan Kekuasaan*

Tomakaka sebagai pemimpin tradisional dipilih dan didukung oleh masyarakat berdasarkan persyaratan-persyaratan baku yang hanya orang terbaiklah yang memiliki persyaratan tersebut. Lagi pula para pembantu

Tomakaka adalah orang yang mempunyai kredibilitas dan integritas, dan ini menyebabkan kepemimpinan *Tomakaka* sangat didukung dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Hal ini pula menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dijalankan dalam menciptakan kemakmuran dan harmoni sosial senantiasa dipatuhi.

Dalam pandangan masyarakat, *Tomakaka* menjadi tempat bergantung dan berlindung bagi masyarakat. Apabila terjadi sesuatu perselisihan di antara keluarga atau kerabat, maka *Tomakaka* selalu berperan menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam penyelesaian itu, *Tomakaka* akan bersikap adil, jujur sehingga dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Karena itu pula, *Tomakaka* diminta pendapatnya tentang banyak hal, seperti perkawinan, mulai dari proses pelamaran sampai dengan penentuan hari, waktu yang baik dan jam pernikahan, maupun tentang hal-hal lain dalam kehidupan sosial. Sementara untuk meningkatkan kemajuan masyarakat, *Tomakaka* berperan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di antara keluarga dan kerabat agar dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Di samping itu, keluarga dan kerabat tetap menjunjung tinggi kehormatan *Tomakaka*, dan tidak akan membicarakan kejelekannya sangat dipantang dalam komunitas *To Ilan Batu*.

- b. Muhamad Aedil Akbar. 2017. *Elit Berkuasa Dan Kepemimpinan Tradisional (Studi Kasus Relasi Kuasa Antara Pemerintah Kabupaten Takalar Dengan Karaeng Galesong)*

Eksistensi *karaeng* Galesong dapat terjaga dengan baik dimasyarakat Takalar terkhusus dikecamatan Galesong. Karena ‘*Karaeng*’ Galesong

masih memegang teguh moral pemimpin terdahulu, ini dibuktikan kharisma '*Karaeng*' Galesong di era demokrasi ini masih bisa bertahan, faktor moral merupakan faktor yang sangat menentukan berjaya dan tidak berjayanya seorang pemimpin, raja atau *karaeng/penguasa* di masyarakat. Moral merupakan landasan dan kriteria utama dari rakyat yang dipimpinnya, Moral inilah yang dipegang teguh oleh *Karaeng* Galesong sehingga eksistensinya dapat terjaga, tidak seperti pemimpin saat ini dimana pemimpin lebih mendahulukan hasrat akan kekuasaan dari pada moral. Relasi *Karaeng* Galesong dengan pemerintah Kabupaten Takalar saat ini tidaklah begitu baik, ini dibuktikan dengan penerbitan Lembaga adat daerah di Kabupaten Takalar yang terbilang lambat, dengan lambatnya terbentuk perda 84. Lembaga adat daerah *Karaeng* Galesong beserta jajaran adat yang ada tidak dapat berbuat banyak dalam pengembangan nilai kearifan local yang ada di Kerajaan Galesong, Relasi yang cukup baik *Karaeng* Galesong lakukan

dengan Calon Bupati terpilih Kabupaten Takalar, Relasi ini berbentuk dukungan kepada calon Bupati tersebut, hal ini cukup efektif dimana kemenangan diraih oleh calon bupati tersebut di daerah kekuasaan *Karaeng* Galesong yaitu Kecamatan Galesong Utara, Selatan dan Galesong kota.

c. Fahri Rezki Rahman. 2013. Aktualisasi Nilai Budaya Lokal Dalam Kepemimpinan Pemerintahan Di Kota Palopo

Aktualisasi ialah sebuah proses tindakan atau pelaksanaan untuk mewujudkan terlaksananya suatu hal yang telah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana aktualisasi diartikan pelaksanaan atau

penerapan. Dan juga dimaksudkan untuk menjadi sarana membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Kemudian berfungsi sebagai sebuah tindakan individu yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan, memastikan terlaksananya tujuan tersebut dan memberikan hasil yang bersifat praktis kepada sesama. Terkait dengan penelitian ini aktualisasi yang dimaksud adalah pelaksanaan atau penerapan tentang konsep nilai budaya lokal *adele*, *lempu*, *getteng*, oleh para pemimpin pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), yang didasarkan atas pemahaman akan nilai lokal tersebut.

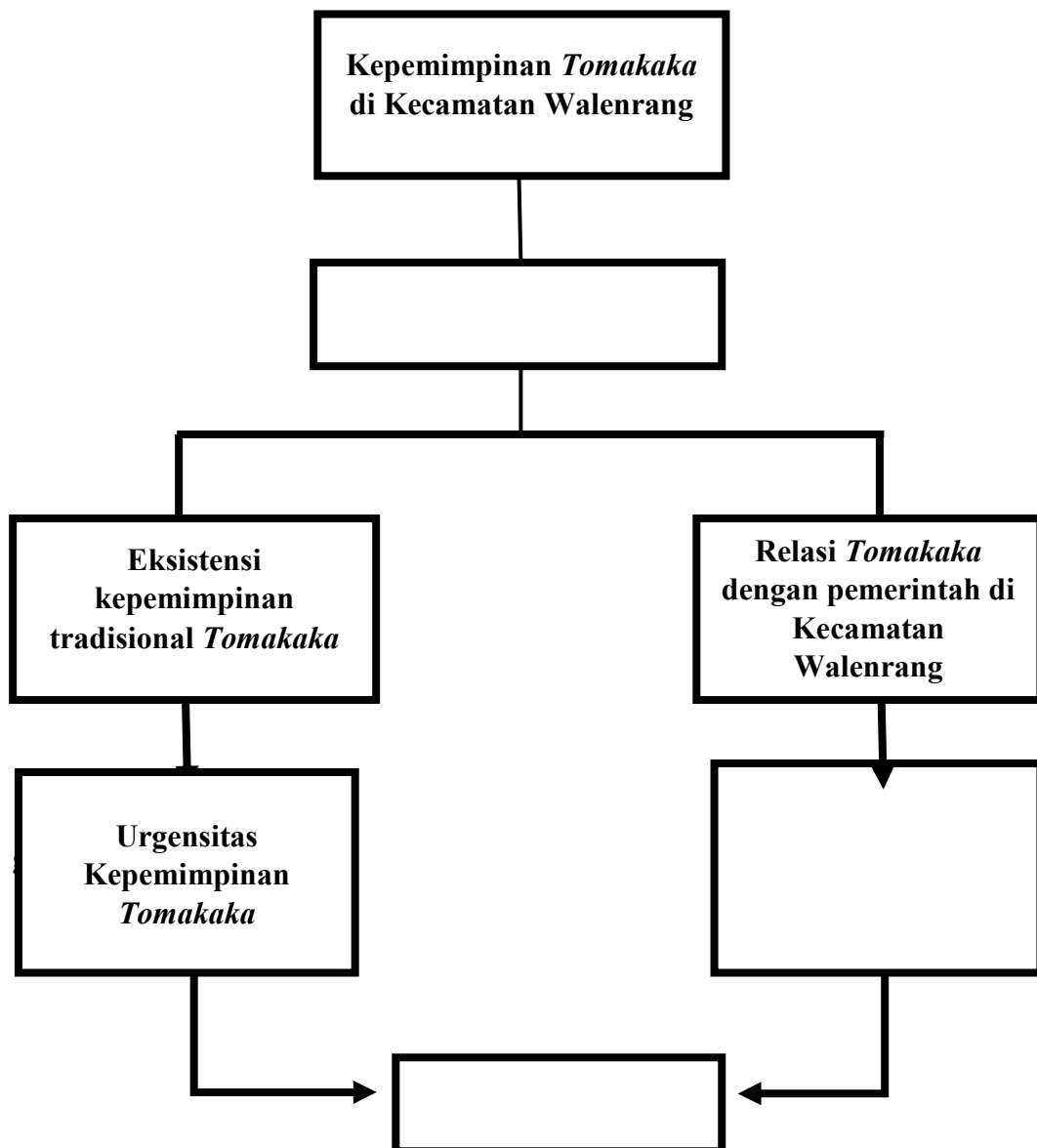
B. Kerangka Konsep

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan terdahulu, maka pada bagian ini akan di uraikan beberapa hal yang di jadikan penulis sebagai landasan berpikir kedepannya. Landasan yang di maksud akan lebih mengarahkan untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang dipaparkan sebelumnya. Untuk itu penulis menguraikan landasan berpikir di bawah ini. Sehingga hal-hal yang akan diteliti sepenuhnya dapat dipastikan meskipun kerangka konsep yang diberikan belum sepenuhnya dapat dipastikan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Di dalam suatu masyarakat terdapat pemimpin yang mempunyai hak atau otoritas dalam menjalankan pemerintahannya, seperti halnya pemerintahan yang ada di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, terdapat dua bentuk pemerintahan

yakni bentuk pemerintahan modern yang dipimpin oleh Camat, Lurah atau Kepala Desa dan bentuk pemerintahan tradisional yang dipimpin oleh *Tomakaka*, yang dimana keduanya masih eksis di masyarakat, dalam proses sosialnya mereka juga menciptakan relasi dengan pemerintahan untuk mengatur masyarakat yang ada di Kecamatan Walenrang.

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti tertarik untuk meneliti kepemimpinan *Tomakaka* di Kecamatan Walenrang yang mana kepemimpinan *Tomakaka* tersebut merupakan salah satu wujud otoritas tradisional yang ada di Kecamatan Walenrang. Untuk itu peneliti menjabarkan hasil penelitian ini menjadi dua bagian yaitu, eksistensi kepemimpinan tradisional *Tomakaka* dan relasi *Tomakaka* dengan pemerintah di Kecamatan Walenrang. Pada bagian pertama yaitu eksistensi *Tomakaka* peneliti akan menitik fokuskan pada urgensitas kepemimpinan *Tomakaka* yang mana peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Dirumusan masalah kedua yaitu relasi *Tomakaka* dengan pemerintah di Kecamatan Walenrang yang mana rumusan masalah tersebut intinya berupa bentuk relasi *Tomakaka* dengan pemerintah di Kecamatan Walenrang.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Tradisi penelitian kualitatif, proses penelitian dan ilmu pengetahuan tidak sederhana apa yang terjadi pada penelitian kuantitatif, karena sebelum hasil-hasil penelitian kualitatif memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan, tahapan penelitian kualitatif melampaui berbagai tahapan berpikir kritis ilmiah, yang mana seorang peneliti memulai berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu. Pada pendekatan ini, penulis menggunakan desain deskriptif kualitatif.

B. Lokus Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan karena di dasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu Kecamatan Walenrang adalah sebuah daerah yang mana kepemimpinan tradisionalnya masih eksis. Selain itu penulis juga mengambil lokasi di

Kecamatan Walenrang dikarenakan penulis lahir dan berkembang di daerah tersebut sehingga penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan relevan.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Karena itu di dalam bahasan ini yang paling penting adalah peneliti “menentukan” informan dan bagaimana peneliti “mendapatkan” informan. Dari kedua usaha tersebut di atas, maka dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan 6 informan yang terdiri: 2 informan dari *Tomakaka* , 2 informan dari aparat pemerintah Kecamatan Walenrang, dan 2 informan dari masyarakat. Peneliti mendapatkan informan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

Pertama, prosedur purposif adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.

Kedua, prosedur kuota dalam prosedur ini peneliti memutuskan saat merancang penelitian, berapa banyak orang dengan karakteristik yang diinginkan untuk dimasukkan sebagai informan. Kriteria yang dipilih memungkinkan peneliti untuk fokus pada orang yang peneliti perkirakan akan paling mungkin memiliki pengalaman, tahu tentang, atau memiliki wawasan kedalam topik penelitian. Peneliti pergi kemasyarakat lalu menggunakan strategi rekrutmen yang tepat untuk lokasi, budaya, dan populasi penelitian menemukan orang yang sesuai dengan kriteria ini, sampai peneliti memenuhi kuota yang ditentukan.

Perbedaan antara prosedur purposif dan kuota adalah bahwa keduanya berusaha untuk mengidentifikasi peserta berdasarkan kriteria yang dipilih. Namun, prosedur kuota lebih spesifik sehubungan dengan ukuran dan proporsi subsampel, dengan subkelompok yang dipilih untuk mencerminkan proporsi yang sesuai dalam populasi.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian peneliti adalah eksistensi kepemimpinan *Tomakaka* di Kecamatan Walenrang.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala dan sebagainya. Karena jenis penelitian ini adalah kualitatif, maka instrumennya adalah peneliti sendiri. Dalam melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan alat bantu seperti kamera, bahkan juga menggunakan pedoman wawancara.

F. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dianalisis dengan tehnik statistic. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dianalisis dengan teknik statistic. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data . Dalam penelitian ini data yang akan diambil adalah jenis data kualitatif. Karena dalam penelitian ini data yang akan digali bersumber dari pernyataan kata-kata atau gambaran tentang sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk penjelasan dengan kata-kata atau tulisan.

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan membagi sumber data menjadi dua bagian, yaitu :

1. sumber data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan, tempat penulisan atau yang menjadi sumber pokok dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup kasus-kasus sosial, kata-kata dan tindakan yang berkaitan dengan eksistensi kepemimpinan serta relasi kepemimpinan *Tomakaka* dengan pemerintahan setempat di Kecamatan Walenrang.
2. Sumber data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari literatur buku kajian pelengkap. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, hasil-hasil studi, skripsi, hasil survey, studi

histories, dan sebagainya. Sumber data sekunder yang penulis gunakan diantaranya, jurnal, artikel-artikel serta buku-buku baik buku bacaan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala yang dihadapi (diselidiki), baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan yang diadakan.

2. *interview* atau wawancara

Interview atau wawancara adalah merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dan subyek yang diteliti atau responden. Dan juga peneliti lebih cenderung banyak menggunakan wawancara atau interview tak berstruktur, karena hal ini lebih memberikan kebebasan dan keluasan hati kepada subyek penelitian sehingga tidak ada suasana terikat yang menjadikan subyek tegang dalam memberikan jawaban.

3. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data dengan cara menggali kumpulan data verbal, baik yang berbentuk tulisan atau tidak.

H. Teknik Analisis Data

Ada dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu: (1) menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap peruses tersebut; dan (2) menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu.

Ada tiga kelompok besar metode analisis data kualitatif, yaitu:

1. kelompok metode analisis teks dan bahasa.
2. kelompok analisis tema-tema budaya.
3. kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual, serta perilaku institusi.

I. Teknik Pengabsahan Data

Dalam setiap pelaksanaan penelitian, data yang terkumpul tentunya tidak semuanya valid dan kredibel. Untuk itu dalam menguji tingkat kredibilitas dan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan cara mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

1. Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan kemudian dimintakan kesepakatan dengan sumber data
2. Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran data, bila data yang dihasilkan

berbeda, peneliti kemudian melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data.

3. Triangulasi Waktu, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain kepada sumber data dalam situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Pemeriksaan keabsahan data ini perlu diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian dengan menggunakan proses triangulasi yakni tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan kata lain dilakukan pengecekan yang didapat melalui wawancara terhadap objek penelitian diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran dan kepercayaan data juga dilakukan untuk memperkaya data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran dan Histori Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Umum Kabupaten Luwu sebagai Daerah Penelitian

a. Sejarah Singkat Kabupaten Luwu

Penamaan kerajaan “Luwu” sudah dikenal sejak abad ke-13 ketika masa pemerintahan raja pertama periode Lontara. Dalam sejarah Luwu dikenal ada dua periode; periode Galigo dan periode Lontara.

Masa periode Galigo disesuaikan dengan sumber tradisi buku sastra kuno “I La Galigo” yang ditemukan BF Matthes di tahun 1888. Periode ini digolongkan oleh RA Kern, seorang ahli sejarah berkebangsaan Belanda sebagai masa prasejarah. Bahkan sebagian lagi menyebutnya “*pseude history*” atau masa sejarah semu.

Dari buku I La Galigo disebutkan ada tiga tempat; Wara, Luwu, dan Wewangriu yang sering dipersamakan dengan Tompotikka. Menurut Sanusi Daeng Mattata, penulis buku “Luwu dalam Revolusi”, menyebutkan kata Luwu itu berasal dari kata ‘*riulo*’ yang artinya diulurkan dari atas. Penamaan ini dikaitkan dengan tradisi lisan yang disakralkan di Tana Luwu. Dari tradisi lisan disebutkan, bumi ini diulurkan dari langit, dihamparkan, kemudian ditaburi dengan kekayaan alam yang melimpah.

Asal usul penamaan Luwu juga dari kata *malucca* (bahasa bugis ware’) atau *malutu* (bahasa palili’) yang artinya keruh atau gelap. Makna

keruh di sini yakni penuh dengan isi, laksana warna air sungai yang banjir. Gelap ditafsirkan hutan rimba belantara yang diselingi hutan sagu di sekitar pantai. Maka dari *malucca* dan *malutu* disederhanakan pengucapannya menjadi *malu'* hingga seterusnya terdengar seperti *lu'* atau *luwu*.

Kata “Luwu” atau Lu’ juga dapat dihubungkan dengan kata laut. Hal ini seperti yang diungkapkan C. Salombe, seorang budayawan Tana Toraja dalam bukunya “Orang Toraja dengan Ritusnya” yang diterbitkan di tahun 1972.

C. Salombe menyebut dalam bukunya, Lu’ berasal dari kata lau yang artinya laut, yang dapat pula dipersamakan dengan timur. Salombe juga menulis, kata Toraja itu merupakan penyebutan orang Luwu kepada orang yang berdiam di daerah pegunungan atau di sebelah barat . *To Raja* atau *To Riaja* bermakna orang di atas atau di sebelah barat.

Sebaliknya, Luwu atau Lu’ merupakan penyebutan orang Toraja kepada yang bermukim di bagian pesisir pantai atau di sebelah timur atau di dataran rendah. Pendapat ini dipertegas pula oleh Andi Zainal Abidin, seorang penulis sejarah dan budaya Bugis. Dia menegaskan, Luwu bermakna wilayah pinggir laut. Sehingga Luwu disebut pula sebagai kerajaan pantai Luwu, karena merupakan kerajaan pertama yang meliputi sepanjang pantai Sulawesi yang mempersatukan wilayah mulai dari Gorontalo di utara dan Selayar di selatan.

b. Geografi dan Iklim

Luas wilayah Kabupaten Luwu yaitu 3.000,25 km² yang terletak pada 2°3'45" - 3°37'30" LS (dari Jakarta) dan 119°41'15" - 121°43'11" BT (dari Jakarta). Kemudian batas-batas wilayah Kabupaten Luwu yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Wajo, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang.

Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropis basah. Terbagi atas 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Intensitas curah hujan termasuk sedang. Curah hujan berkisar antara 2000 – 4000 mm pertahun. Suhu udara rata-rata berkisar antara 30,6°C – 31,6°C pada musim kemarau dan antara 25°C – 28°C pada musim penghujan.

c. Topografi, Geologi dan Hidrologi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu memiliki tingkat kemiringan diatas 40% dengan luas wilayah sekitar 197.690,77 Ha atau 65,89% dari luas wilayah Kabupaten Luwu, sedangkan wilayah dengan kemiringan 0 - 8% dengan luas 42.094,88 Ha atau 14,03%, kemiringan 8 - 15% memiliki luas 29.696,28 Ha atau 9,90%, kemiringan 15 - 25% memiliki luas 8.245,50 Ha atau 2,75% dan 25 - 40% memiliki luas 22.297,60 Ha atau 7,43%. Secara umum, Kabupaten Luwu berada pada ketinggian berkisar antara 0 – 2000 mdpl.

Ditinjau dari kondisi geologi Kabupaten Luwu, maka diketahui bahwa di wilayah Utara kabupaten dan di bagian Timur hingga Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Toraja, Toraja Utara dan Enrekang memiliki formasi batuan terobosan (granit, granodiorit, riolit, diorit, dan aplit), batuan gunung api Lamasi (lava andesit, basal, breksi gunung api, batu pasir, dan batu lanau setempat mengandung felsdpatoid, umumnya terkloritkan dan terkarsitkan, umumnya diduga oligosen karena menindih formasi Toraja (tets yang berumur eosen) dan formasi Latimojong (batu sabak, kuarsit, filit, batu pasir kuarsa malih, batu lanau malih dan pualam setempat, batu lempung malih).

Sedangkan di daerah dataran rendah yang berada dijalur pesisir Kabupaten Luwu, dari Larompong, Suli, Belopa, Ponrang dan Kecamatan Bua serta daerah pesisir sekitarnya, terdiri atas batuan gunung api Baturape-Cindako (pusat erupsi), batuan gunung api lamasi (lava andesit, basal, breksi gunung api, batu pasir, dan batu lanau) mengandung felsdpatoid yang umumnya terkloritkan dan terkarsitkan, endapan aluvium dan pantai (kerikil, pasir, lempung, lumpur, batugamping koral).

Kabupaten Luwu dilalui oleh sebelas sungai yang cukup besar dan panjang, diantara sungai-sungai tersebut yaitu sungai Lamasi yang melintasi Kecamatan Lamasi dan Kecamatan Walenrang, sungai Pareman melintasi Kecamatan Bupon dan Ponrang, sungai Bajo melintasi Kecamatan Bajo dan Kecamatan Belopa, sungai Suli melintasi Kecamatan Suli, sungai Larompong melintasi Kecamatan Larompong, sungai Temboe melintasi

Kecamatan Larompong, sungai Riwang melintasi Kecamatan Larompong dan sungai Siwa melintasi Kecamatan Larompong Selatan. Dari kesebelas sungai tersebut yang terpanjang adalah sungai Pareman dengan panjang tercatat sekitar 73 Km, sedangkan kesepuluh sungai yang lain tercatat memiliki panjang sekitar 12 - 69 Km.

d. Kondisi Demografi

1) Perkembangan jumlah penduduk

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu diketahui bahwa rata-rata pertambahan penduduk dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2007-2011 sebanyak 3.918 jiwa per-tahun. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2007 – 2011 mengalami peningkatan sebesar 1,04 persen, dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya sebesar 335.828 jiwa. Secara umum, jumlah penduduk terbesar pada tahun 2011 terdapat di Kecamatan Bua sebanyak 31,266 Jiwa sedangkan penduduk jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Latimojong sebesar 5,512 Jiwa.

2) Persebaran dan kepadatan penduduk

Jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya tersebar tidak merata di berbagai kecamatan di Kabupaten Luwu. Tahun 2011 jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bua yaitu sebesar 9,31 persen dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Latimojong sekitar

1,64 persen penduduk. Sementara jika dilihat dari kepadatan penduduk per km², Kecamatan Lamasi merupakan daerah terpadat yaitu 487,42 penduduk per kilo meter persegi (km²) dengan luas wilayah hanya 1,4 persen dari luas Kabupaten Luwu, sementara yang paling rendah kepadatannya terdapat di Kecamatan Latimojong yaitu hanya 11,78 penduduk per kilometer persegi (km²) dengan luas wilayah 15,6 persen dari luas Kabupaten Luwu.

3) Rasio jenis kelamin, jumlah rumah tangga dan rata-rata besarnya anggota rumah tangga

Berdasarkan hasil proyeksi sensus penduduk 2010 untuk tahun 2011, angka rasio jenis kelamin dibawah angka 100, tercatat hanya sekitar 98. Ini berarti bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Atau dengan kata lain dari 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Kendati demikian jika dilihat dari kelompok umurnya penduduk umur 5 - 9 memiliki rasio jenis kelamin tertinggi yaitu sebesar 108 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Begitu pula jika diamati menurut kecamatan, di Kecamatan Suli Barat, Bassesangtempe, Latimojong, Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi Timur keadaannya menjadi terbalik angka rasio jenis kelamin melebihi angka 100, yang berarti pula di kecamatan tersebut penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Jumlah rumah tangga keadaan akhir tahun 2011 tercatat sebanyak 73.775 rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 5 orang. Jumlah rumah tangga

ini terbanyak di Kecamatan Bua yaitu sekitar 6.893 rumah tangga dan terkecil di Kecamatan Latimojong dengan jumlah rumah tangga hanya tercatat 1.510 rumah tangga.

2. Deskripsi Khusus Kecamatan Walenrang sebagai Latar Penelitian

a. Demografi Kecamatan Walenrang

Walenrang adalah sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu, Walenrang merupakan Kecamatan yang unik (bersama dengan 5 Kecamatan lainnya yaitu Walenrang barat, Walenrang timur, Lamasi, dan Lamasi timur) di karenakan induk ibukota Kabupaten berada di antara Kota/ Kabupaten yang lain, jarak antara ibukota Kabupaten dengan Kecamatan ini cukup jauh yaitu sekitar 100 Km dan harus melewati 1 kota yang lain yang di tempuh dalam waktu 2 jam.

Kecamatan Walenrang memiliki luas wilayah 94,6 Km, yang terdiri dari 8 Desa dan 1 Kelurahan yaitu; Kelurahan Bulo dengan luas wilayah 2,04 km², Desa Tombang 24,36 km², Desa Lalong 6,17 km², Desa Harapan 6,36 km², Desa Baramamase 5,43 km², Desa Walenrang 26, 92 km², Desa Saragi 2,59 km², Desa Batusitanduk 15,12 km², Desa Kalibamamase 5,34 km². Dengan jumlah kepala keluarga ada 3.947 orang dengan jumlah jiwa mencapai 20.802 orang.

b. Kondisi Sosial Kecamatan Walenrang

1) Tingkat Pendidikan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam

hal penyediaan prasarana pendidikan selama tahun ajaran 2017, Pemerintah Kecamatan Walenrang telah menyediakan 13 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK), 12 unit Sekolah Dasar (SD), 4 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP) dan 5 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA/SMA/SMK).

Selain sarana dan prasarana, kemampuan membaca dan menulis juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan itu, kualitas SDM selalu diupayakan untuk ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas, demi tercapainya keberhasilan pembangunan. Sementara guna mencapai kualitas pendidikan yang diinginkan diperlukan sarana dan prasarana serta unsur penunjang lainnya dalam proses pendidikan.

2) Kondisi Ekonomi

Potensi sumber daya alam Walenrang adalah pertanian dan perkebunan, dimana luas lahan sawah sekitar 2.265 Ha, lahan bukan sawah sekitar 4.726 Ha, dan lahan bukan pertanian 2.469 Ha (data tahun 2015). Dengan potensi tersebut mata pencaharian utama mereka adalah bertani sawah dan berkebun, selain itu banyak juga di antara mereka berprofesi sebagai pedagang, dan PNS.

3) Kehidupan Sosial Budaya

Masyarakat Walenrang adalah masyarakat heterogen terdiri dari berbagai suku, dan suku utama yang merupakan pribumi adalah Luwu, serta suku lain seperti Bugis, dan Toraja. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Luwu khususnya di Kecamatan Walenrang menggunakan bahasa Indonesia dengan aksen (logat) Sulawesi Selatan sebagai bahasa utama sehari-hari karena mayoritas penduduknya adalah masyarakat yang multietnis. Misalnya saja di tempat-tempat umum seperti pasar, kantor, sekolah, dan lain sebagainya ketika masyarakat multietnis tersebut saling berbaur. Namun beda halnya ketika berada di rumah masing-masing yang mana masyarakat Kecamatan Walenrang dominan menggunakan bahasa daerahnya. Dengan adanya masyarakat yang multietnis tersebut, terdapat beberapa akulturasi budaya di Kecamatan Walenrang.

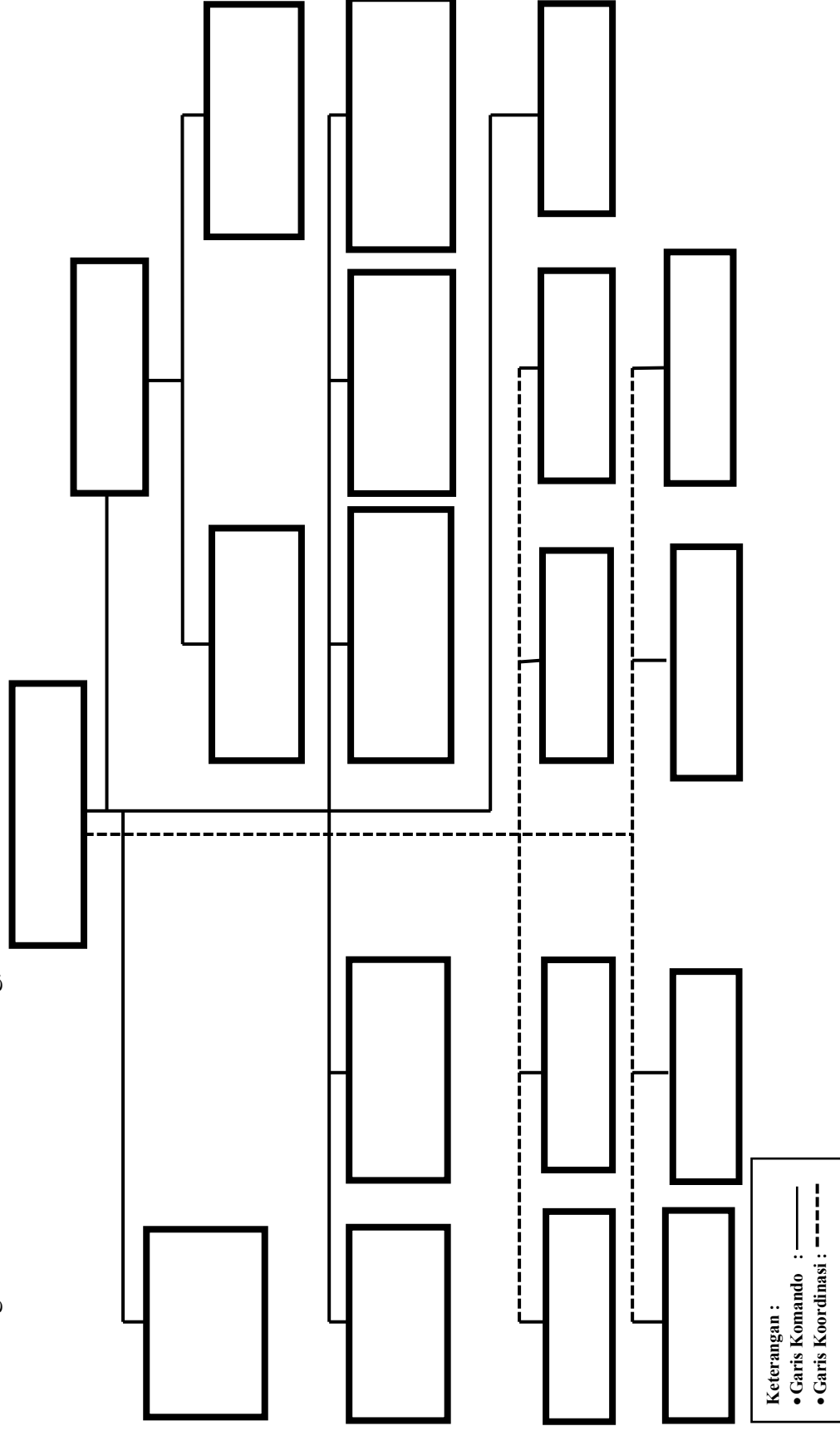
c. Struktur Organisasi Kecamatan Walenrang

Kecamatan merupakan wilayah administratif yang berada di bawah Kabupaten atau Kota. Suatu Kecamatan merupakan gabungan dari beberapa Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya ia akan dibantu oleh perangkat-perangkat lainnya.

Menurut peraturan Nomor 41 tahun 2007 menjelaskan bahwa kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten atau kota. Dengan demikian seorang camat memiliki kedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris

Daerah. Atau bisa dikatakan bahwa organisasi Kecamatan berfungsi serta bertanggung jawab untuk membantu tugas-tugas Bupati dalam mengoptimalkan berbagai kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan yang berada di lingkup wilayah Kecamatan.

Dalam organisasi Kecamatan juga memiliki gambar struktur mengenai bagian-bagian Kecamatan. Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi Kecamatan Walenrang;



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Walenrang
(Sumber: Kantor Kecamatan Walenrang)

3. Informan Penelitian

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, dimana dalam menentukan informan dilakukan dengan cara teknik (purposive sampling) yang dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yaitu masyarakat Kecamatan Walenrang. Dalam penentuan informan, pertama-tama dipilih dua sampai tiga orang tetapi karena dengan tiga orang ini belum merasa lengkap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan melengkapi data yang diberikan oleh tiga orang sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga jumlah informan yang peneliti temukan sebanyak 6 orang.

Identitas informan yang dipilih didasarkan atas beberapa identifikasi seperti Nama, Umur, Pekerjaan, Jenis Kelamin, Alamat.

a. Informan yang Bernama Edi Masagala (Laki-Laki)

Informan yang bernama Edi Masagala berumur 50 tahun, adalah informan yang bertempat tinggal di Batusitanduk Kecamatan Walenrang. Beliau merupakan Camat di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

b. Informan yang Berinisial Hj. Andi Besse Opu DG. Manutte (Perempuan)

Hj. Andi Besse Opu DG. Manutte berusia 70 tahun dan bertempat tinggal di Kelurahan Bulu merupakan salah satu *Tomakaka (Tomakaka Bulu)* di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

c. Informan yang Bernama Merry Rindja (Perempuan)

Informan yang bernama Merry Rindja berusia 42 tahun, selain sebagai ibu rumah tangga ia merupakan salah satu Sekretaris Kelurahan yang ada di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

d. Informan yang Bernama Hendrik Tallamma (Laki-laki)

Hendrik Tallamma merupakan *Tomakaka Perembonan* yang berusia 47 tahun selain menjabat sebagai *Tomakaka* ia juga berprofesi sebagai petani dan bertempat tinggal di Kelurahan Bulo Kecamatan Walenrang Kecamatan Walenrang.

e. Informan yang Bernama Editha Tampang (Perempuan)

Editha Tampang berusia 73 beliau merupakan orang tua dari informan yang bernama Hendrik Tallamma. Editha Tampang juga berprofesi sebagai petani dan bertempat tinggal di Kelurahan Bulo Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

f. Informan yang Bernama Suriani (Perempuan)

Informan yang bernama Suriani berusia 50 tahun merupakan salah satu masyarakat yang ada di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Walenrang dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan

dokumentasi, maka terdapat beberapa hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dari objek yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Eksistensi Kepemimpinan *Tomakaka* di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu

Eksistensi biasanya dijadikan sebagai acuan pembuktian diri bahwa kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang dapat berguna dan mendapat nilai yang baik di mata orang lain. Eksistensi bisa juga dikenal dengan satu kata yaitu keberadaan. Konsep eksistensi menurut Dagun (dalam Kartika, 2012: 15) dalam kehidupan sosial manusia yang terpenting adalah keadaan dirinya sendiri atau eksistensi dirinya sendiri. Eksistensi dapat diartikan sesuatu yang menganggap keberadaan manusia tidaklah statis, artinya manusia senantiasa bergerak dari kemungkinan ke kenyataan.

Proses ini berubah bila kini menjadi sesuatu yang mungkin maka besok akan berubah menjadi kenyataan karena manusia itu mempunyai kebebasan untuk bergerak. Bereksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan bagi hidupnya. Konsekuensinya jika kita tidak bisa mengambil keputusan dan tidak berani berbuat maka kita tidak bereksistensi dalam arti yang sebenarnya. Artinya, eksistensi menjelaskan tentang penilaian ada atau tidak adanya pengaruh terhadap keberadaan seseorang tersebut. Apabila orang lain menganggap kita mempunyai sebuah eksistensi, maka keberadaan kita sudah dianggap dan dapat diperhitungkan oleh orang-orang di sekeliling kita.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan menurut

Abidin Zaenal eksistensi adalah : “ Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.” Jadi berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi adalah kemampuan seseorang untuk tetap dikenal dan dihargai melalui wujud dan hasil kerjanya.

Dalam rangkaian proses penelitian ini dimana salah satunya adalah kegiatan observasi lapangan dengan didasarkan pada pengamatan. Observasi di lapangan dilakukan di tempat penelitian yaitu di Kecamatan Walenrang Kabupten Luwu, dengan data hasil observasi lapangan sebagai berikut :

“Tomakaka selalu diikutsertakan dalam setiap kegiatan pemerintahan.Tomakaka di sini sebagai tokoh adat dan setiap kegiatan adat, Tomakaka mewakili dengan setiap perangkatnya. Dimana tugas Tomakaka di sini selain sebagai tokoh adat dalam kegiatan yang berkaitan dengan upacara adat tomakaka juga bertugas sebagai pemelihara kedamaian, kesejahteraan, menjaga nama baik serta mengambil keputusan apabila ada masalah yang terjadi di masyarakat.”

Dari hasil pengamatan di lapangan dapat dikatakan bahwa keberadaan *Tomakaka* sangat penting bagi masyarakat Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu terlihat dengan keikutsertaan *Tomakaka* dalam setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat Walenrang, seperti halnya untuk kegiatan adat dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat walenrang harus didatangkan dari pihak *Tomakaka*.

Dari hasil observasi lapangan di atas berkaitan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kelurahan Bulu Kecamatan Walenrang atas nama Hj. Andi Besse Opu Dg Manutte' selaku *Tomakaka Bulu*. Bahwa menanggapi mengenai eksistensi *Tomakaka* di masyarakat Kecamatan Walenrang yaitu :

“ Aturan-aturan yang berkaitan dengan adat masih dilakukan dan jalankan oleh masyarakat Kecamatan Walenrang hingga saat ini misalnya aturan mengenai upacara adat pernikahan, pesta panen, dan bahkan untuk upacara kematian. Masyarakat di Kecamatan Walenrang sebelumnya harus berkomunikasi dengan Tomakaka mengenai adat apa yang akan dilakukan”.(Wawancara pada hari Selasa 4 September 2018)

Dari kutipan wawancara diatas sangat jelas bahwa keberadaan *Tomakaka* dalam setiap kegiatan adat yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Walenrang masih sangat diapresiasi. Selain itu di ungkapkan oleh ibu Suriani selaku masyarakat Kecamatan Walenrang sebagai berikut :

“ Penting karena masyarakat, Tomakaka ,dan pemerintah itu sejalan. Misalkan dalam masyarakat ada masalah, pemerintah dan Tomakaka serta masyarakat bermusyawara untuk penyelesaian masalah tersebut. Pemerintah tidak bisa tanpa adat, mereka saling membutuhkan, dan harus selalu sejalan”. (Wawancara pada hari Selasa 11 September 2018)

Dari keterangan ibu surini maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan *Tomakaka* sangat penting karena *Tomakaka* mampu bekerjasama dengan aparat pemerintah setempat, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu *Tomakaka* dan juga pemerintah harus selalu sejalan karena mereka saling membutuhkan satu sama lain.

Untuk mendapat informasi mendalam mengenai dengan tugas-tugas *Tomakaka* yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah, Salah satu aparat

pemerintah yaitu Ir. Edi Masagala selaku camat Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu yaitu sebagai berikut :

“ Secara tertulis atau aturan pemerintah tidak memberikan tugas tertentu, apa yang harus dilakukan oleh Tomakaka, jadi jabatan Tomakaka itu adalah jabatan yang berkaitan dengan adat istiadat namun keberadaan Tomakaka sangat penting terutama dalam menciptakan keamanan dalam masyarakat, menata kelakuan dan berperilaku adat dan budaya di masyarakat, karena Tomakaka itu adalah panutan di masyarakat, secara adat istiadat Tomakaka sangat berperan penting. Mengapa penting seperti yang saya katakan tadi sebelum kita bangsa Indonesia kitakan beradaptasi, ada hukum adat dan hukum positif, jadi sebelum sampai ke pemerintah masalah-masalah yang ada di masyarakat diselesaikan terlebih dahulu di Tomakaka, jadi sangat membantu dalam kehidupan ketatanan kita”. (Wawancara pada hari Selasa 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menerangkan bahwa tugas-tugas Tomakaka yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan yaitu, keberadaan Tomakaka sangat penting sebab Tomakaka merupakan orang yang dituakan dan menjadi panutan terutama dalam menciptakan keamanan dalam masyarakat, menata kelakuan dan berperilaku adat dan budaya di masyarakat.

Setiap kegiatan pemerintah, Tomakaka selalu ikut serta, seperti yang di ungkapkan oleh ibu Merry Rindja SE selaku sekretaris Kelurahan Bulu sebagai berikut:

“ Iya, Tomakaka harus di ikutsertakan karena mereka adalah Tokoh adat, misalnya ikut kegiatan musrembang, biasanya ada pengusulannya ke pemerintah, misalnya dalam kegiatan adat, musrembang sendiri di adakan satu kali setahun yaitu sekitaran bulan 2. Kadang Tomakaka diwakili perangkatnya apabila ada kegiatan musrembang, dengan adanya Tomakaka ini bagus karena jika ada masalah dia juga diikutkan untuk bisa mengatasi masalah tersebut dengan kerja sama pemerintah, jika ada masalah harus dihadirkan Tomakaka bersama dengan perangkatnya”. (Wawancara pada hari Rabu 5 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menerangkan bahwa setiap kegiatan pemerintah *Tomakaka* selalu diikutsertakan misalnya dalam kegiatan adat dan *Tomakaka* juga diikutkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan bekerja sama pihak aparat pemerintah setempat.

2. Relasi *Tomakaka* dengan Pemerintah di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu

Di Indonesia , kebangkitan masyarakat adat dan harmonisasi dengan pemerintah mulai nampak setelah tumbangnya rezim orde baru, kebangkitan masyarakat adat di Indonesia ditandai dengan munculnya undang-undang yang mengatur dan melindungi hak dari masyarakat adat itu sendiri misalnya terdapat pada undang-undang dasar RI tahun 1945 dalam perubahan kedua pasal 18 B yang menjelaskan mengenai hubungan negara dan pengakuan masyarakat adat yang berbunyi :

- a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.
- b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau *relation*. Menurut Michener & Delamater (dalam Hidayati, 2014:22) relasi

sosial juga disebut hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Hubungan dalam relasi sosial merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Beberapa tahapan terjadinya relasi sosial yaitu (a) *Zero contact* yaitu kondisi dimana tidak terjadi hubungan antara dua orang; (b) *awareness* yaitu seseorang sudah mulai menyadari kehadiran orang lain; (c) *surface contact* yaitu orang pertama menyadari adanya aktivitas yang sama oleh seseorang di sekitarnya; dan (d) *mutuality* yaitu sudah mulai terjalin relasi sosial antara 2 orang yang tadinya saling asing.

Menurut Spradley dan McCurdy (dalam Astuti, 2012:1), menyatakan bahwa relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relative lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini disebut sebagai pola relasi sosial yang terdiri dari dua macam yaitu (a) relasi sosial asosiatif yaitu proses yang terbentuk kerja sama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi yang terjalin cenderung menyatu; (b) relasi sosial disosiatif yaitu proses yang terbentuk oposisi misalnya persaingan.

Suatu relasi atau hubungan akan ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat macam tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya. Dikatakan sistematis karena terjadinya secara teratur dan berulang kali dengan pola yang sama. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi, manusia berusaha mencukupi semua kebutuhannya untuk kelangsungan

hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Itulah sebabnya manusia perlu berelasi atau berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu pihak pemerintah dan masyarakat hukum adat harus mempunyai hubungan yang baik agar tercipta kerukunan di dalam masyarakat.

Berangkat dari masalah relasi kepemimpinan *Tomakaka* dengan pemerintah Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, berikut hasil observasi mengenai hubungan atau relasi pihak *tomakaka* dengan pemerintah setempat.

“ Dalam era modern ini Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik perkembangan secara infrasturuktur maupun sumber daya masyarakat yang ada di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, bahkan banyak kalangan yang menganggap bahwa Kecamatan Walenrang lebih berkembang daripada Kecamatan-Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Luwu. Walaupun saat ini Tomakaka sudah tidak dapat memimpin lagi secara konstitusional namun peran dari pihak Tomakaka tetap bergerak di dalam bidang kemasyarakatan dan sosial budaya. Dan pandangan pemerintah Kecamatan Walenrang saat ini terhadap keberadaan Tomakaka itu dianggap masih sangat penting sebab pihak pemerintah Kecamatan Walenrang menganggap Tomakaka sebagai mitra atau bekerjasama dalam bidang kemasyarakatan. Jadi, ada pemerintahan umum dan ada pemerintahan adat. Dan pada dasarnya, adat lebih banyak berada dalam bidang kemasyarakatan seperti dalam hal keagamaan, atau biasa disebut sebagai pemimpin moral dalam berperilaku, dalam hal peningkatan sumber daya manusia, serta sumber daya alam dalam masyarakat Kecamatan Walenrang”.

Berangkat dari paparan diatas, maka hal yang dapat disimpulkan terkait keberadaan *Tomakaka* di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu yaitu, walaupun *Tomakaka* kini tidak memimpin lagi secara konstitusional pemerintah kecamatan Walenrang masih sangat menghargai keberadaan *Tomakaka* di wilayahnya, ini terbukti dengan adanya kerja sama yang terjalin

baik, antara pemerintah Kecamatan Walenrang dengan pihak *Tomakaka* yang dimana kerja sama ini bisa dikatakan bersifat simbiosis mutualisme.

Berangkat dari hasil observasi, untuk itu dilakukan wawancara untuk mendapatkan hasil di lapangan, maka dengan ini dilakukan wawancara dengan ibu Hj. Andi Besse Opu Dg Manutte mengenai relasi *Tomakaka* dengan pemerintah kecamatan walenrang kabupaten luwu.

Berikut kutipan wawancara dengan ibu Hj. Andi Besse Opu Dg Manutte selaku *Tomakaka Bulu* sebagai Berikut :

*“ Adapun bentuk kerja sama dengan aparat pemerintah itu apabila ada masalah biasa Tomakaka diundang dalam rapat yang berkaitan dengan adat. Oleh karena itu tugas utama dari Tomakaka yang berkaitan dengan permasalahan adat yang ada di masyarakat, serta adat kematian, pengantin dan kalau ada malabbe’ dan pasang sampe’. Dan dalam menjalankan tugas saya biasanya mendapat arahan apabila berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, dan yang berkaitan dengan adat, pihak pemerintah juga tidak semenah-menah, keberadaan Tomakaka juga masih diakui oleh pemerintah setempat”.
(wawancara pada hari Selasa 4 September 2018)*

Dari jawaban tomakaka bulo diatas maka dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, pihak pemerintah juga mengawasi dan memberikan arahan kepada pihak *Tomakaka* apabila menjalankan tugas yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah.

Untuk mendapatkan informasi lebih jauh terkait hal ini, dilakukan lagi wawancara dengan bapak Ir. Edi Masagala selaku camat di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

Berikut ini kutipan wawancara dengan bapak Ir. Edi Masagala selaku camat yang menjabat di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu :

“ Ketika ada kegiatan Tomakaka apabila pihak pemerintah di undang maka pihak pemerintah akan hadir. Kalau ada kegiatan pemerintah maka Tomakaka akan diundang , namun itu semua ada koridornya ada batasannya, jika Tomakaka dibutuhkan kehadirannya maka akan dihadirkan, misalnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, atau jika ada perselisihan di masyarakat maka Tomakaka akan dilibatkan, jadi sebelum masalah itu sampai ke pemerintah maka akan diselesaikan dulu di Tomakaka. Dalam perancangan pembangunan Tomakaka juga dilibatkan misalnya musbangdes Tomakaka harus dilibatkan, musrembang kecamatan Tomakaka juga harus dilibatkan”. (Wawancara pada hari Selasa 4 September 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh Mery Rindja selaku sekretaris

Kelurahan Bulu Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, berikut :

“penting, karena Tomakaka bekerja sama dengan pemerintah, apabila ada masalah-masalah yang terjadi masyarakat atau lingkungan Tomakaka serta perangkatnya harus dikumpulkan karena Tomakaka juga ikut serta menyelesaikan masalah tersebut misalnya masalah pertikaian atau kekacauan antara pemuda harus Tomakaka yang dipanggil untuk menyelesaikan masalah masyarakatnya apalagi Tomakaka itu ada komunitas masyarakatnya misalnya Bulu ada Tomakakanya sendiri, Desa Walenrang ada juga Tomakakanya. Jadi harus di datangkan Tomakakanya agar bisa menyelesaikan masalahnya, iya sejalan, karena kerja sama misalnya dalam bentuk kerja sma adatnya, harus sejalan dengan pemerintah, misalkan dalam adat kemitian harus tetap sejalan dengan pemerintah bekerja sama”. (Wawancara pada hari Selasa 11 September 2018)

Ditambahkan oleh ibu Editha Tampang, beliau merupakan salah satu masyarakat yang ada di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, yang juga merupakan ibu dari Tomakaka Parembonan mengatakan bahwa :

“ Ada, saling mendukung, seperti yang saya bilang tadi kalau agama, pemerintah itu lebih kemoral, sedangkan Tomakaka itu lebih ke adat saling menghargai karena sesuatu itu harus dibina. Dan dalam pembangunan daerah Tomakaka harus ada, pemerintah ada, tokoh

agama ada. Dalam kegiatannya pun Tomakaka selalu diundang tokoh agama juga di undang di kegiatan pemerintahan. Karena masing-masing memiliki tugas dan kewajiban dalam masyarakat". (Wawancara hari Senin 10 September 2018)

Di perkuat oleh pernyataan bapak Hendrik Tallamma selaku *Tomakaka*

Parembonan adalah sebagai berikut :

" Bisa juga, dalam menjalankan tugas sebagai Tomakaka saya kadang mendapat arahan dari pemerintah setempat, kadang jika ada kaitannya dengan pemerintah Tomakaka di panggil juga untuk menasehati, misalnya ada kenakalan di suatu masyarakat contohnya di wilayah Parembonan karena adat tidak bisa memperbaiki itu maka di panggil pemerintah dan mereka bermusyawara mencari jalan keluarnya. Tapi pemerintah memberi kebebasan untuk Tomakaka meberikan nasehat". (Wawancara hari Senin 10 September 2018)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, tugas *Tomakaka* dan pemerintah memiliki porsi masing-masing dalam mengayomi masyarakat namun tugas mereka tetap sama, sehingga sangat penting *Tomakaka* memiliki suatu relasi dengan pemerintah yang bersifat saling menguntungkan baik bagi pihak pemerintah, dan *Tomakaka* . Kerja sama yang terjalin pun tidak semata-mata untuk menjalankan tugas mereka semata akan tetapi agar tercipta suatu ketatanan di dalam masyarakat.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada teori otoritas yang di kemukakan dan dikembangkan oleh Max Weber (dalam Upe 2010 : 206) terdapat tiga tipe otoritas dalam masyarakat yakni, otoritas legal (*Legal-Rational Authority*), otoritas tradisional (*Traditional Authority*), dan otoritas kharismatik (*Charismatic Authority*). Diantara ke tiga tipe otoritas tersebut yang berkaitan dengan hasil penelitian peneliti adalah tipe

otoritas tradisional (*Traditional Authority*), dan otoritas kharismatik (*Charismatic Authority*).

Tipe otoritas tradisional merupakan otoritas yang memiliki keabsahan berdasarkan kesucian/kekudusan suatu tradisi tertentu yang hidup di tengah masyarakat. Sehingga ketika seseorang taat dan patuh terhadap suatu peraturan atau pada suatu struktur otoritas disebabkan karena kepercayaan mereka terhadap sesuatu yang bersifat kontinyu.

Hubungan yang terjalin antara tokoh yang memiliki otoritas dan bawahan sejatinya merupakan hubungan pribadi yang cenderung mengarah sebagai bentuk perpanjangan hubungan kekeluargaan. Adanya kesadaran yang penuh antara pemimpin untuk melaksanakan kewajibannya dan bawahan sebagai bentuk kesetiaan dan kecintaan kepada pemimpin.

Tipe kharismatik digambarkan secara sosiologis oleh Weber yaitu sebagai suatu pengakuan oleh para pengikut seorang pemimpin (*leader*) akan keistimewaannya. Weber kemudian memahami bahwa yang dimaksud dengan otoritas kharismatik sebagai tipe kepemimpinan yang keabsahannya diakui oleh kualitas, keistimewaan, keunggulan. Selain itu, otoritas kharismatik ditemukan pada pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang dapat menginspirasi orang.

Kedua tipe otoritas ini berkaitan dengan kepemimpinan *Tomakaka* di Kecamatan Waalenrang Kabupaten Luwu karena dalam pengangkatan *Tomakaka* yang menjadi pertimbangan yaitu, (1) *Tomakaka* harus berasal dari turunan *Tomakaka* atau *kajajian*, (2) memiliki rumpun keluarga yang besar (*ma'rapun*). Kedua pertimbangan pengangkatan *Tomakaka* tersebut sesuai dengan tipe

otoritas tradisional yang sudah dijelaskan diatas, berbeda dengan pertimbangan pengangkatan Tomakaka yang ke (3) *Tomakaka* harus mempunyai kedewasaan berfikir atau *kamatuaan*, (4) Harus memiliki kekayaan atau *kasugiran*, (5) dan memiliki kebijakan dan kepintaran atau *kakainawaan*, serta yang ke (6) memiliki keberanian atau *kabaranian*, dalam hal ini seorang *Tomakaka* dianggap sebagai “*Tau memanna massipa tau meman*” yang artinya, *Tomakaka* sebagai keturunan orang baik-baik dengan sifat-sifatnya yang juga baik, lebih berkaitan dengan tipe otoritas kharismatik yang dipaparkan pada paragraf sebelumnya.

Eksistensi *Tomakaka* dapat terjaga dengan baik dimasyarakat Kecamatan Walenrang, karena *Tomakaka* masih memegang teguh moral pemimpin terdahulu, serta masih menjalankan tugasnya dengan baik yang dimana tugas seorang *Tomakaka* adalah memelihara kedamaian, kesejahteraan, menjaga nama baik dan mengambil keputusan apabila ada masalah yang terjadi di dalam masyarakat. ini dibuktikan kharismatik di era demokrasi ini masih bisa bertahan, faktor moral merupakan factor yang sangat menentukan berjaya dan tidak berjayanya seorang pemimpin, di masyarakat. Moral merupakan landasan dan kriteria utama dari rakyat yang dipimpinnya apabila ketika dalam menjalankan tugas seorang pemimpin telah dinilai terpuji dan masih dibutuhkan oleh rakyatnya. Jadi bisa dikatakan Eksistensi kepemimpinan *Tomakaka* di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu masih sangat sangat penting bagi masyarakat Kecamatan Walenrang.

Pemimpin merupakan figur sentral dalam kelompok sosial atau masyarakat, sesuai dengan posisi yang di tempatnya dia memegang peranan

penting dalam mengatur kelangsungan hidup kelompok, seperti membina hubungan antarpribadi, menciptakan suasana harmonis, mengatasi ketegangan dan konflik. Hal ini berkaitan dengan teori struktural fungsional yang dikemukakan Talcott Parson, bahwasanya suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerjasama secara terorganisir dan bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem kerja yang selaras dan seimbang .

Terkait keberadaan *Tomakaka* di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu yaitu, walaupun *Tomakaka* kini tidak memimpin lagi secara konstitusional pemerintah kecamatan Walenrang masih sangat menghargai keberadaan *Tomakaka* di wilayahnya, ini terbukti dengan adanya kerja sama yang terjalin baik, antara pemerintah Kecamatan Walenrang dengan pihak *Tomakaka* yang dimana kerja sama ini bisa dikatakan bersifat simbiosis mutualisme serta struktural fungsional. Di Kecamatan walenrang Kabupaten Luwu, pihak pemerintah juga mengawasi dan memberikan arahan kepada pihak *Tomakaka* apabila menjalankan tugas apabila itu berkaitan dengan kegiatan pemerintah.

Tugas *Tomakaka* dan pemerintah memiliki porsi masing-masing dalam mengayomi masyarakat namun tugas mereka tetap sama, sehingga sangat penting *Tomakaka* memiliki suatu relasi dengan pemerintah yang bersifat saling menguntungkan baik bagi pihak pemerintah maupun *Tomakaka* . Kerja sama yang terjalin pun tidak semata-mata untuk menjalankan tugas mereka semata akan tetapi agar tercipta suatu ketatanan di dalam masyarakat.

Secara langsung atau tidak langsung jika dilihat dari relasi *Tomakaka* dengan pemerintah setempat yang telah dipaparkan diatas sangat terlihat jelas bahwa Tomakaka di Kecamatan Walenrang masih eksis dan aktif serta dianggap penting, baik itu dari pihak pemerintah maupun masyarakat Walenrang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa, :

1. Eksistensi kepemimpinan *Tomakaka* di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, masih sangat diperhitungkan dan dianggap masih penting untuk dipertahankan, ini terlihat dari keikutsertaan *Tomakaka* dalam setiap kegiatan di masyarakat baik itu berkaitan dengan adat istiadat maupun dalam memelihara kedamaian, kesejahteraan, menjaga nama baik dan mengambil keputusan apabila terjadi masalah di dalam masyarakat setempat.
2. Relasi *Tomakaka* dengan Pemerintah di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu saat ini masih terjalin sangat baik ini terbukti dari adanya bentuk kerjasama yang terjalin antara pemerintah dengan *Tomakaka* yang ada di Kecamatan Walenrang. Meskipun *Tomakaka* kini sudah tidak menjabat lagi secara konstitusional namun pihak pemerintah Kecamatan Walenrang masih sangat menghargai keberadaan *Tomakaka* dan selalu mengikutsertakan *Tomakaka* disetiap kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan di dalam masyarakat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap eksistensi *Tomakaka* di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, maka di ajukan beberapa saran yaitu :

1. Bagi masyarakat dan pemerintah Kecamatan Walenrang kita tidak dapat melupakan dan berusaha menghilangkan nilai-nilai sejarah yang ada di Kecamatan Walenrang, maka dari itu perlu adanya kesadaran dari *Tomakaka*, pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Kecamatan Walenrang.
2. Perlu adanya pengawasan dan dorongan kepada pemerintah daerah Kabupaten Luwu agar kiranya perda persoalan lembaga adat daerah di Kabupaten Luwu, agar nantinya perda tersebut menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan Pihak-pihak kerajan yang ada dan berkembang di Kabupaten Luwu, sehingga nilai-nilai moral yang diwariskan oleh pemimpin terdahulu dapat menjadi warisan untuk masyarakat Kabupaten Luwu terkhususnya di Kecamatan Walenrang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Aedil Muhamad. 2017, *Elit Berkuasa Dan Kepemimpinan Tradisional (Studi Kasus Relasi Kuasa Antara Pemerintah Kabupaten Takalar Dengan Karaeng Galesong)*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar : UIN Alauddin Makassar.
- Arifin, Jamaluddin dkk. (2015). *Buku Pedoman Skripsi (Khusus Bagi Mahasiswa Bidang Kajian Penelitian Sosial Budaya)*. Makassar : Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Bungin, Burhan. 2007, *Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Damsar. 2013, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana.
- Depertemen Pendidikan Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Haviland, A. William. 1988, *Antropologi*. (Diterjemahkan oleh Soekodjo, Jakarta : Erlangga).
- Hidayati, D. S. 2014. Peningkatan Relasi Sosial melalui *Social Skill Therapy* pada Penderita *Schizophrenia Katatonik*. *Jurnal Online Psikologi*. Diakses pada tanggal 17-07-2018
- Hijjang, Pawennari. 1998, *Pengembangan Model Pemukiman Kembali Masyarakat Perambah Hutan di Sulawesi Selatan*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Keesing, Roger, M. 1992, *Antropologi Budaya Suatu Prespektif Kontemporer*. Jakarta : Erlangga.
- Mc. Glynn F dan Arthur, Tuden. 2000, *Pendekatan Antropologi Pada Perilaku Politik*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ritzer George. 2014. *Sociology : A Multiple Paradigm Science*. (Diterjemahkan oleh Alimandan, Jakarta : Rajawali Pers).
- Rahman Rezki Fahri. 2015, *Aktualisasi nilai budaya kepemimpinan Lokal di Kota Palopo*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Sani Yamin Muh. 2013, *Tomakaka: Demokrasi Lokal Dan Kekuasaan*. *Jurnal Sejarah dan Budaya*. Vol. 4. No. 2. Diakses pada tanggal 15-07-2018
- Soekanto, Soerjono. 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung :Alfabeta.

Undang-Undang 1945 Pasal 18 Ayat 2 Dan UU No32 Tahun 2004

Upe Ambo. (2010). *Tradisi aliran dalam sosiologi dari filosofi positivistic ke post positivistic*. Jakarta Rajawali pers.

Lampiran

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Umur :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan:

1. Bagaimanakah sejarah *Tomakaka* di Kecamatan Walenrang ?
2. Apa saja tugas-tugas yang anda lakukan sebagai *Tomakaka* ?
3. Apa saja bentuk kerjasama anda dengan pemerintah dalam menjalankan tugas anda?
4. Apakah dalam menjalankan tugas anda sebagai *Tomakaka* apakah ada arahan dari pemerintah setempat?
5. Apa saja aturan yang diterapkan *Tomakaka* dalam masyarakat Kecamatan Walenrang ?
6. Apakah ada kemiripan antara tugas *Tomakaka* dengan aparat pemerintah setempat?
7. Bagaimana keberadaan *Tomakaka* pada era demokrasi saat ini ?
8. Apa saja tugas-tugas *Tomakaka* yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah?

9. Dalam kegiatan apa saja *Tomakaka* ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah ?
10. Apakah setiap kegiatan *Tomakaka* pemerintah ikut serta berpartisipasi atau begitu pula sebaliknya?
11. Apa saja tugas-tugas dari *Tomakaka* yang berkaitan dengan pemerintahan?
12. Apakah ada bentuk kerjasama antara *Tomakaka* dengan aparatur Desa setempat?

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Tanggal Observasi :

Tempat :

No	Aspek Yang Diamati	Keterangan
1.	Lokasi observasi	
2.	Kondisi sosial masyarakat yang dipimpin oleh <i>Tomakaka</i>	
3.	Demografi Kecamatan	
4.	Kondisi pemerintahan Desa setempat yang memiliki relasi dengan <i>Tomakaka</i>	

Lampiran 3

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan *Tomakaka Bulo*





2. Wawancara dengan Bapak Camat Walenrang





3. Wawancara dengan Ibu Sekertaris Kelurahan Bulo



4. Wawancara dengan *Tomakaka Parembonan*





5. Wawancara dengan salah satu masyarakat di Kecamatan Walenrang



7. Contoh Undangan Pengukuhan Tomakaka

UNDANGAN :

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr(I) :.....
di-
T e m p a t :

As. AL/HR/UN. MA. UD.

Dengan puji syukur kehadiran ALLAH Subhana Wataalah, kami sekeluarga mengundang dengan hormat Bapak/Ibu/Sdr(I) untuk turut bersama kami dalam rangka Pengukuhan /Pelantikan TOMAKAKA Bulo yang KE. XIII kepada Cucuk kami Nama : Andi Beese' Opu Dg. Manutta' yang Insyah Allah akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu 17 Januari 1990.
J a m : 11.00. siang.
T e m p a t : Rumah Mantan Kades Bulo (samping Lapangan Bulo) di Batusitanduk.

Atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(I) sebelum dan sesudahnya kami aturkan banyak terima kasih.

Wassalam dari kami yang mengundang.


- Opu DG. Massewa.
- H. Andi Tenri Murbakti Opu DG. Natajang.
- M. Syehbutuh (Mantan Kades Bulo)
- Tandang (Kades Bulo)
- Andi Bachtiar. H (Kades Harapan)
- Andi Huchtar. S. Opu DG. Pangaro (Kades Tabah) - Gattang' (Ambe' Lajeng)
- Hendrik S. Opu (Kades Lalung)
- Akib Sabbaran (Kades Ilan Batu)
- D. Runtuk
- Mathius Ekke'
- H. H. K. DG. Masalle
- K. Syehbutuh (Tomakaka Uru)
- P. Tenbu (Tomakaka Karenbonan)
- H. Sampetondok (Tomakaka Bure)
- Pori' (Tomakaka Pasang Kaliba')
- Bala (Tomakaka Paranta')
- Y. Parents.
- Sibiti (Tomakaka Bolang Tua)
- Mene' Kasisi'
- Achmad Husain (Sekcan Malenrang')
- Y. Lata' Bulo
- Garatta'
- Y. J. Gatji.
- Lenganan.
- E. Tjanik
- P. Nettu
- A. Baso
- Y. Bulka'
- Latif (Iman Desa Bulo)
- Botto (Tomakaka Simbuang)

UNDANGAN :

Kepada Yth :
Bapak/Ibu/Sdr(I) *Papa J. H. H.*
di-
T e m p a t :

8. Surat Keputusan Komposisi Dan Personil Lembaga Adat Tomakaka

fota Kofi nyu



DATU LUWU
Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kota Palopo
Telp / HP : 081 355 475 360 - 081 242 293 880

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 62/DL/XXXIX/III/2009

TENTANG
KOMPOSISI DAN PERSONIL LEMBAGA ADAT
TOMAKAKA BULO

Menimbang : Bahwa untuk membantu mewujudkan lestarnya Lembaga Adat di Wilayah Kerajaan Luwu yang bersih dan berwibawa dipandang perlu menetapkan *Komposisi dan Personil Lembaga Adat Tomakaka Bulodengan* Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 tentang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat di daerah huruf : a, b c dan d.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 tentang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat di daerah Bab 1 Pasal 1 ayat a, b c, d, e, f, g, h, i j dan k.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di daerah.
4. Hasil pertemuan konsolidasi Raja Se-Nusantara dan Lembaga Adat tanggal 22-25 Maret di Bali bersama LP2K yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Dirjen Dept Kebudayaan dan Pariwisata Direktur Pengembangan Budaya dan Politik Kesbangpol Depdagri.
5. Hasil pengamatan dan penelitian LP2K selama 15 tahun tentang perkembangan Lembaga Adat di Kerajaan Luwu berdasarkan Pakem, Tradisi dan adat istiadat GAGASAN MASA LAMPAU di Kerajaan Luwu.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : *Komposisi dan Personil Lembaga Adat Tomakaka Bulo* di Wilayah Kerajaan Luwu sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari SK ini.

Kedua : Bahwa *Lembaga Adat Tomakaka Bulo* harus mempunyai keluarga, kerabat setia, abdi dalam pasukan, dan mampu dalam melakukan pelestarian seni budaya, pengembangan adat istiadat di wilayah Kerajaan Luwu. Wajib melakukan secara profesional, bertanggung jawab dan bermartabat.

Ketiga : Bahwa posisi keabsahan, kedudukan *Lembaga Adat Tomakaka Bulo* yang lahir dari keturunan kerajaan, yang semuanya dikukuhkan dan disaksikan oleh Lembaga Adat yang berada di wilayah Kerajaan Luwu. Dengan demikian memperjelas kedudukan perbedaan PEWARIS dan AHLI WARIS.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259, Telp. (0411) - 860 132, 90221 Makassar

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **MARHAMAH**
NIM : 10538 3012 14
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Pembimbing I : **Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.**
Judul Skripsi : **Otoritas Tradisional (Studi Naratif Eksistensi
Kepemimpinan Tomakaka di Kecamatan Walenrang
Kabupaten Luwu)**

Pembimbing I

No.	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1.	01/10/2018	Perhatikan teknik penge- tihan hasil penelitian BAB IV Deskripsi umum & deskripsi khusus	
2.	02/10/2018	Teknik pengumpulan data	
3.	03/10/2018	Daftar isi, abstrak	
4.	09/10/2018	Kesimpulan & saran	
5.	05/10/2018	Att	05/10/2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi

Des. H. Nurdin, M.Pd
NBM. 575 474





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259, Telp. (0411) - 860 132, 90221 Makassar

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MARHAMAH
NIM : 10538 3012 14
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Pembimbing II : Dr. Muhammad Akhir, M.Pd.
Judul Skripsi : Otoritas Tradisional (Studi Naratif Eksistensi
Kepemimpinan Tomakaka di Kecamatan Walenrang
Kabupaten Luwu)

Pembimbing II

No.	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1	4/6/2018	lengkap AG Stal, Daftar isi, kata pengantar dan lampiran - 10 lainnya	
2	5/6/18	layar di ubah AG	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi



Dr. H. Nurdin, M.Pd
NBM. 575 474



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259, Telp. (0411)-866132, Fax. (0411)-860132

Nomor : 928/FKIP/A.1-II/VIII/1439/2018
Lampiran : Proposal 1 (satu) Rangkap
Hal : **Pengantar LP3M**

Kepada Yang Terhormat,
Kepala LP3M Unismuh Makassar
Di –
Makassar

Assalamu 'AlaikumWr. Wb.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawahini:


Nama : Marhamah
Stambuk : 10538301214
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Alamat : Jln. Tallasalapang II

Adalah yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi

Dengan Judul : **Otoritas Tradisional (Studi Naratif Eksistensi Kepemimpinan Tomakaka Di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu)**

Demikian disamapaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'AlaikumWr. Wb

Makassar, Agustus 2018
Dekan FKIP

Etwan Alib, S.Pd., M.Pd., Ph.D
NBM. 860934



Nomor : 2153/Izn-5/C.4-VIII/VIII/37/2018

07 Dzulhijjah 1439 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

18 August 2018 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

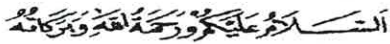
Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Luwu

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Luwu



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0928/FKIP/A.1-II/VIII/1439/2018 tanggal 18 Agustus 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MARHAMAH**

No. Stambuk : **10538 3012 14**

Fakultas : **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Jurusan : **Pendidikan Sosiologi**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Otoritas Tradisional (Studi Naratif Eksistensi Kepemimpinan Tomakaka di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Agustus 2018 s/d 25 Oktober 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.



Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 296/PENELITIAN/17.04/DPMPTSP/III/2018
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Camat Walenrang
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar :
2153/Izn-5/C.4-VIII/VIII/37/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Marhamah
Tempat/Tgl Lahir : Palopo / 23 September 1996
Nim : 10538 3012 14
Jurusan/Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Alamat : Lingk. Lengkong Riri
Kelurahan Bulu
Kecamatan Walenrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan
"Skripsi" dengan judul :

OTORITAS TRADISIONAL (STUDI-NARATIF EKSISTENSI KEPEMIMPINAN TOMAKAKA DI KECAMATAN WALENRANG KABUPATEN LUWU)

Yang akan dilaksanakan di **KECAMATAN WALENRANG**, pada tanggal **23 Agustus 2018 s/d 23
September 2018**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan
ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 23 Agustus 2018
Kepala Dinas

LUTHER BIJA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19630617 199203 1 010

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar;
4. Mahasiswa (i) Marhamah;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN WALENRANG

Jl. Poros Palopo - Masamba KM. 21 Kode pos 91951

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 131 / KW-PEM / IX / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. EDI MASAGALA**
NIP : 19680114 199303 1 006
Jabatan : CAMAT WALENRANG
Instansi : Kantor Camat Walenrang

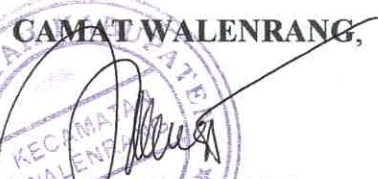
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **MARHAMAH**
Tempat/Tgl Lahir : Palopo, 23 September 1996
NIM : 10538 3012 14
Jurusan/Program Studi : S1 Pendidikan Sosiologi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Judul Penelitian : Otoritas Tradisional (Studi Naratif Eksistensi Kepemimpinan Tomakaka di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu)

Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Walenrang dari tanggal 23 Agustus 2018 s.d 10 September 2018.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walenrang, 10 September 2018

CAMAT WALENRANG,

Ir. EDI MASAGALA
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19680114 199303 1 006

RIWAYAT HIDUP



Marhamah, Lahir di Palopo, pada tanggal 23 September 1996, anak ketiga dari 4 bersaudara. Pada tahun 2000 memulai pendidikan pertamanya di TK Dharma Wanita Kabupaten Luwu. Pada tahun 2002 penulis melanjutkan pendidikannya di SD Negeri 256 Pabuntang Kabupaten Luwu dan berhasil menyelesaikan pendidikannya di SD pada tahun 2008, pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Lamasi dan berhasil menyelesaikan pendidikan di SMP tersebut pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada sekolah SMA Negeri 1 Walenrang. Kemudian pada tahun 2014 penulis berhasil menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Walenrang.

Pada tahun 2014 selepas dari SMA Negeri 1 Walenrang, penulis melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi di Makassar, dan penulis berhasil mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan mengambil Jurusan Pendidikan Sosiologi.